

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
TANTANGAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN PETANI
KECIL SWADAYA SAWIT DI INDONESIA



PENELITI

LUCI PAONGANAN SE, M.Acc

NIDN. 0518028502

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

TAHUN 2020


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia
Nama Peneliti : Luci Paongan, SE, M.Acc
NIDN/NIDK : 0518028502
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 0821 9211 8556
E-mail : lcp@poltekipp.ac.id
Anggota 1 : -
Nama Lengkap : -
Anggota 2 : -
Nama Lengkap : -
Sumber Pendanaan : Program Hibah Kompetitif Politeknik LPP

Yogyakarta, 15 September 2020
Dosen Peneliti,

Menyetujui
Kepala UPPM

(Lestari Hetalesi Putri, S.T., M.Eng)
NIDN: 0525108401

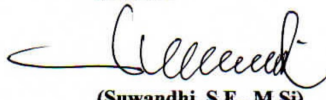

(Luci Paongan, S.E., M.Acc)
NIDN: 0518028502

Menyetujui,

Wakil Nirektur I Bidang Akademik


(Ratna Sri Harjanti, S.T., M.Eng)
NIDN: 0520027801

Reviewer


(Suwandhi, S.E., M.Si)
NIDN: 0504095901

LAPORAN AKHIR PENELITIAN TAHUN 2020

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus / Bidang Unggulan	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial humaniora – seni budaya - pendidikan	Ekonomi dan sumber daya manusia	Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri	Ilmu Ekonomi

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi	Program Studi	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Luci Paongan, SE, M.Acc	Politeknik LPP Yogyakarta	Akuntansi	Dosen	ID = 6150350	0

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (Jika ada)

Mitra	Nama Mitra
Tidak ada	Tidak ada

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (accepted,	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit,
--------------	--------------	----------------------------------	--

		published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	url paten, keterangan sejenis lainnya)
2020	Jurnal Nasional	<i>Published</i>	Jurnal Agro Ekonomi (S2)

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

5. ANGGARAN

Total RAB Tahun I = Rp. 5.300.000,00

Total Pembelanjaan Tahun I = Rp. 5.301.300,00

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
Honor	Honor asisten penelitian	Tahap	4	100.000 – 300.000	Rp. 1.000.000,00
Bahan habis pakai & peralatan penunjang	Fotocopy Kuesioner	Lembar			Rp. 259.000,00
Bahan habis pakai & peralatan penunjang	Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner (koordinasi oleh komting, PJ)	Orang, kelas, kali			Rp. 700.000,00
Lain-lain	Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner (pulsa telepon)	Orang	131	Rp. 10.000,00	Rp. 1.310.000,00

	Reward/marchandise kuesioner	Orang	5	Rp. 100.000,00	Rp. 500.000,00
	Peralatan/perengkapan laboratorium akuntansi				Rp. 999.400
	Perjalanan (Kendaraan & Bensin)				Rp. 250.000
	ATK, Pajak dan Laporan				Rp. 282.900
Total Biaya Yang Dikeluarkan					Rp. 5.301.300

A. RINGKASAN

Keberadaan petani kecil swadaya sawit di Indonesia belum terdata secara resmi, berada dalam posisi yang rentan dan belum banyak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada munculnya tantangan ekonomi dan kelembagaan yang dihadapi oleh para petani kecil swadaya sawit dalam mengelola lahan sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit, tantangan kelembagaan dan solusi yang diharapkan oleh petani kecil swadaya sawit. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode survey dan dianalisa secara statistic deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode angket dengan komunikasi telepon pada Desember 2019. Responden penelitian terdiri dari 109 petani kecil swadaya sawit di 14 provinsi di Indonesia. Aspek yang disurvei meliputi deskripsi umum petani kecil swadaya sawit, aspek tantangan ekonomi, aspek kelembagaan petani dan solusi yang diharapkan petani. Hasil penelitian menunjukkan tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit adalah harga jual TBS berfluktuasi dan rendah. Sebagian besar petani tidak bergabung dalam organisasi petani karena ketidakterediaan organisasi petani. Model kelembagaan yang diinginkan petani adalah koperasi yang dikelola oleh petani. Solusi yang diharapkan petani meliputi perlindungan harga jual TBS, tersedianya kelembagaan petani, akses ke pabrik kelapa sawit, perbaikan infrastruktur dan penyuluhan tentang praktek budidaya yang baik.

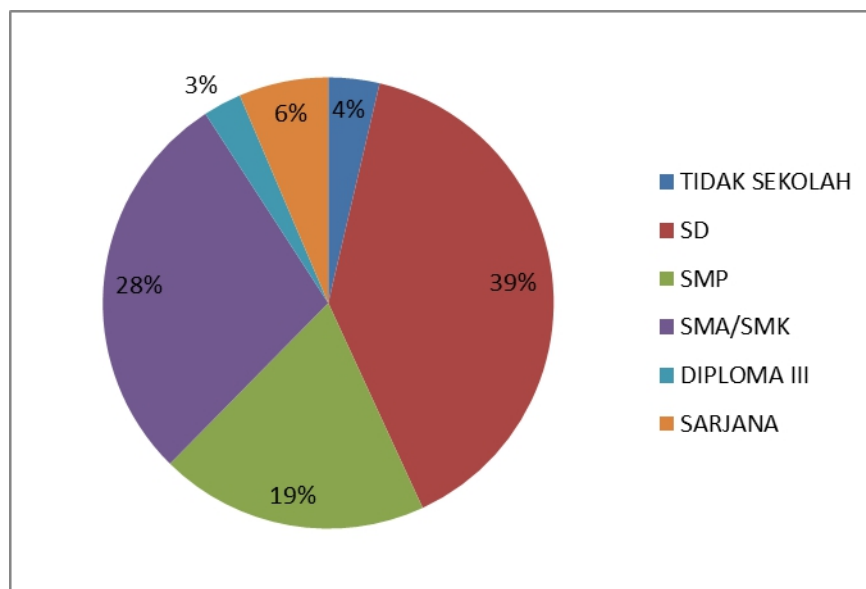
B. KATA KUNCI

Kata kunci: petani kecil swadaya sawit, kelapa sawit, tantangan ekonomi, kelembagaan petani

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Deskripsi Umum Petani Kecil Swadaya Sawit

Sebagian besar petani swadaya sawit telah mengikuti pendidikan formal dengan jumlah tertinggi menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 39% disusul dengan lulusan pendidikan tingkat atas SMA/SMK 28% dan pendidikan tingkat menengah SMP 19%. Sementara itu, 13% sisanya terdapat 3% yang tidak pernah bersekolah, 6% lulusan sarjana/master dan 4% lulusan program diploma. Data disajikan dalam Gambar 2 dibawah ini:



Sumber: Data Primer (2019)

Gambar 2. Tingkat Pendidikan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia

Deskripsi umum petani kecil swadaya sawit selanjutnya meliputi umur petani, jumlah tanggungan per petani, asal petani apakah penduduk asli atau pendatang, luas areal kelapa sawit (KS), umur tanaman KS, harga jual TBS terakhir, produksi TBS per bulan, penjualan TBS per bulan, jarak dari kebun ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terdekat, petani mengusahakan komoditi lain, petani memiliki pekerjaan/usaha lain seperti yang disajikan dalam Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Variabel dan Deskripsi Umum Petani Kecil Swadaya Sawit

No	Variabel	Deskripsi	Rata-Rata
1	Umur Petani	Tahun	51,26
2	Jumlah Tanggungan per petani	Orang	5
3	Penduduk asli	%	54
4	Luas Areal KS	Hektar	2,35
5	Umur Tanaman KS	Tahun	12,26
6	Harga Jual TBS terakhir*	Rupiah per Kg	1.304,46
7	Produksi TBS per bulan	Ton	1,73
8	Penjualan TBS per bulan	Rupiah	2.282.384,91
9	Jarak ke PKS	Kilometer	18,91
10	Mengusahakan komoditi lain	%	41
11	Memiliki pekerjaan/usaha lain	%	59

Sumber: Data Primer (2019)

Keterangan: * = merupakan harga jual TBS pada saat survei dilakukan yakni pada bulan Desember 2019

Rata-rata umur petani kecil swadaya sawit adalah 51,26 tahun, 54% merupakan penduduk asli dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggung rata-rata 5 orang per petani. Rata-rata luas lahan kebun sawit yang dikelola adalah seluas 2,35 hektar dan tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan rata-rata berumur 12,26 tahun. Rata-rata produksi TBS per bulan berkisar pada angka 1,73 ton dengan harga jual TBS per kg rata-rata sebesar Rp. 1.304,46. Harga jual TBS sangat bervariasi dari yang terendah Rp. 700,00/kg dan tertinggi Rp. 1.760,00/kg. Hasil dari penjualan TBS per bulan rata-rata Rp. 2.282.384,91. Jarak lahan petani ke PKS terdekat juga cukup bervariasi dengan rata-rata berjarak 18,91 km. Sebanyak 41% petani mengusahakan komoditi lain seperti karet, kakao, kopi, kemiri, cengkeh, lada, jeruk nipis, rambutan, duku, ubi kayu, jagung, nanas dan kacang tanah sebagai sumber penghasilan tambahan. Selain itu, 59% petani memiliki usaha/pekerjaan lain seperti usaha dagang, bengkel/repairasi, beternak, buruh hingga karyawan pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tantangan Ekonomi Petani Kecil Swadaya Sawit

1. Harga Jual TBS Berfluktuasi dan Rendah

Tabel 3. Variabel dan Deskripsi Harga Jual TBS

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Harga Jual TBS Stabil	1 = Ya ; 0 = Tidak	15
2	Harga Jual Saat Ini Menguntungkan	1 = Ya ; 0 = Tidak	70

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan survei, hanya 15% dari petani kecil swadaya sawit yang menilai jika harga jual TBS stabil dan 85% lainnya menilai harga jual TBS tidak stabil (berfluktuasi). Petani kecil swadaya sawit mengeluhkan harga jual TBS yang tidak stabil dan dapat turun drastis (anjlok) ke harga Rp. 200,00 per kg. Hal ini menjadi tantangan petani kecil swadaya sawit yang sebagian besar berharap agar harga jual TBS dapat lebih stabil karena pendapatan pekebun swadaya bergantung pada harga jual TBS. Petani kecil swadaya sawit juga mengeluhkan harga jual TBS yang berbeda secara signifikan antara satu agen/perusahaan dengan yang lainnya walaupun berada dalam wilayah yang sama. Hasil survei menunjukkan harga jual TBS yang diterima petani pada saat survey dilakukan sangat bervariasi dari harga terendah Rp. 700/kg hingga harga tertinggi Rp. 1.760/kg. Dari rentang harga tersebut terdapat selisih yang besar yakni Rp. 1.160/kg. Harga jual TBS yang diterima petani rata-rata berada di harga Rp. 1.304,46/kg (Tabel 2). Sementara itu, 70% petani kecil swadaya sawit yang disurvei menyatakan harga TBS/kg sebesar rata-rata 1.304,46 (Tabel 2) merupakan harga jual yang cukup menguntungkan bagi petani kecil swadaya sawit saat ini.

Agustira et al. (2015) menyatakan bahwa permasalahan utama petani sawit saat ini adalah rendahnya produktifitas diantaranya karena penggunaan bahan tanaman palsu (ilegitim), rendahnya penerapan kultur teknis, perlambatan *replanting* dan lemahnya institusi/kelompok tani serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial petani. Oleh karena hal tersebut maka pendapatan perkebunan petani kelapa sawit belum optimal dan belum memenuhi prinsip keberlanjutan. Penelitian ini mengajukan hasil yang berbeda yakni permasalahan atau tantangan utama yang dihadapi petani sawit dari sudut pandang petani adalah ketidakpastian yang tinggi karena fluktuasi harga jual TBS. Menurut 85% petani kecil swadaya sawit yang disurvei dalam penelitian ini, harga jual TBS berfluktuasi. Penghasilan petani dari penjualan sawit menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi akibat fluktuasi harga dan rendahnya harga yang diterima petani kecil swadaya yakni mencapai Rp. 200,00/kg. Selain itu, terdapat harga jual TBS yang bervariasi di kalangan petani pada periode yang sama (Desember 2019) yakni terendah Rp. 700,00/kg dan tertinggi Rp. 1.760,00 menunjukkan terjadinya asimetri informasi

harga TBS di kalangan petani sekaligus mengindikasikan ketidakberesan dalam penetapan harga TBS. Sekalipun harga jual TBS sebesar Rp. 1.304,46/kg cukup menguntungkan namun tidak ada jaminan harga TBS pada level ini akan terus stabil. Sebagian besar petani juga menilai harga jual TBS yang diterima tersebut tidak sesuai dengan harapan karena harga jual yang diterima petani lebih rendah daripada standar harga yang ditetapkan atau berlaku bagi pihak lain.

Menurut Daemeter (2015), harga jual TBS merupakan faktor penentu pendapatan petani sawit. Harga TBS tersebut ditetapkan berdasarkan harga rata-rata CPO terbaru di global market dan penetapan harga oleh pemerintah provinsi berdasarkan formula tertentu. Harga TBS diperbaharui setidaknya seminggu sekali atau setiap minggu. Namun harga tersebut merupakan biaya pra-transaksi (*pre-transaction cost*) yang masih harus memperhitungkan biaya transportasi, sortasi, rendemen/*yield loss*, biaya bongkar muat dan biaya-biaya lainnya sehingga petani sawit swadaya biasanya menerima harga jual TBS lebih rendah 40% dari harga tersebut. Lebih lanjut Daemeter (2015) menyatakan jika fluktuasi harga TBS sebagai dampak dari fluktuasi harga CPO dunia berpengaruh signifikan terhadap keuntungan dan arus kas yang diterima petani. Pada saat harga TBS tinggi maka petani bisa mendapatkan keuntungan yang setara dengan upah minimum wilayah namun pada saat harga TBS rendah maka pendapatan petani anjlok kurang dari setengah upah minimum wilayah.

Hasil penjualan TBS per bulan rata-rata sebesar Rp. 2.282.384,91 sebelum dipotong dengan biaya-biaya perusahaan sawit yang dikeluarkan dimana jumlah ini merupakan pendapatan kotor petani kecil sawit swadaya pada saat harga jual TBS relatif tinggi yakni Rp. Rp. 1.304,46 / kg (Tabel 2). Pada saat harga jual TBS turun maka jumlah yang didapatkan petani juga menjadi lebih rendah. Dengan pendapatan yang tidak pasti dari penjualan TBS, petani kecil swadaya sawit diperhadapkan pada biaya perusahaan sawit yang cukup tinggi sekaligus kebutuhan untuk menghidupi rata-rata 5 orang anggota keluarga. Hal ini menjadikan para petani kecil swadaya sawit mengupayakan sumber penghasilan alternative dengan menanam komoditi lain (41% petani) dan memiliki

pekerjaan/usaha lain selain berkebun sawit (59% petani). Data ini menunjukkan dari sudut pandang petani bahwa hanya bertani sawit saja belum bisa diandalkan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini berbanding terbalik dengan kontribusi industri sawit dari ekspor CPO secara nasional yang telah menjadi komoditi andalan untuk devisa negara yang telah melampaui nilai ekspor minyak dan gas. █

Bagi petani, keuntungan secara keuangan menjadi hal terpenting dan merupakan motivasi utama untuk dapat berpartisipasi dalam sertifikasi berkelanjutan (Hidayat et al. 2015) dengan demikian permasalahan perekonomian petani perlu diselesaikan sebelum dapat mengatasi isu keberlanjutan pada sisi petani. Tantangan terkait isu keberlanjutan nampaknya belum menjadi perhatian utama petani karena bagi petani keuntungan finansial untuk memperoleh penghidupan yang memadai merupakan hal yang paling utama.

2. Legalitas Lahan Baik Namun Infrastruktur Kurang Memadai

Tabel 4. Variabel dan Deskripsi Legalitas Lahan dan Infrastruktur

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Memiliki Bukti Legalitas Lahan	1 = Ya ; 0 = Tidak	84
2	Jalan mudah dilalui mobil/truk sepanjang tahun (kondisi kemarau & hujan)	1 = Ya ; 0 = Tidak	39

Sumber: Data Primer (2019)

Sebanyak 84% dari pekebun swadaya telah memiliki bukti kepemilikan lahan. Baik petani yang berasal dari penduduk asli maupun pendatang sama-sama menyebutkan tidak ada kendala untuk memiliki bukti legalitas lahan. Temuan ini

mendukung penelitian Inobu (2016) di Kotawaringin Barat menunjukkan sebagian besar (60%) petani memiliki sertifikat tanah (sertifikat hak milik). Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Daemeter (2015) menyatakan bahwa petani kecil swadaya umumnya tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan dan hanya memiliki surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Hasil ini juga berbeda dengan Sahara et al (2018) yang menemukan bahwa sebagian besar petani kecil swadaya tidak memiliki sertifikat tanah mengingat mahalnya biaya yang dikeluarkan serta proses administrasi yang rumit bagi petani.

Hasil survei untuk infrastruktur jalan menunjukkan akses transportasi yang bisa dilalui kendaraan baik pada musim kering maupun musim hujan masih menjadi kendala tersendiri bagi petani. Terdapat 39% petani swadaya yang menilai akses transportasi di wilayahnya sudah baik dan 61% sisanya menilai infrastruktur jalan belum memadai. Kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan mengakibatkan tingginya biaya transportasi pasca panen karena dibutuhkan kendaraan khusus untuk dapat melalui jalan yang rusak. Hal ini diperburuk dengan jarak antara lokasi lahan petani kecil swadaya sawit dengan pabrik kelapa sawit relatif jauh yakni rata-rata 18,91 km (Tabel 2).

3. Akses Pasar: Minimnya Akses Langsung ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Tabel 5. Variabel dan Deskripsi Akses Pasar

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Petani mudah mendapatkan pembeli TBS	1 = Ya ; 0 = Tidak	94
2	Petani menjual TBS ke pengepul/tengkulak/agen	1 = Ya ; 0 = Tidak	91

3	Petani menjual TBS ke Pabrik Kelapa Sawit	1 = Ya ; 0 = Tidak	11
4	Lokasi untuk melakukan transaksi penjualan TBS mudah dijangkau	1 = Ya ; 0 = Tidak	82
5	Petani menerima pembayaran atas penjualan TBS pada saat transaksi	1 = Ya ; 0 = Tidak	79
6	Harga yang ditetapkan pembeli sesuai dengan harapan petani	1 = Ya ; 0 = Tidak	25

Sumber: Data Primer (2019)

Petani kecil swadaya sawit cenderung tidak mengalami kendala dalam menjual hasil panen, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei yakni 94% petani kecil swadaya sawit mudah untuk mendapatkan pembeli. Dalam hal ini, petani kecil swadaya sawit menjual hasil panennya kepada pengepul/tengkulak/agen (91%) dan/atau ke pabrik kelapa sawit/PKS (11%). Lokasi untuk melakukan transaksi penjualan juga mudah dijangkau oleh 82% petani kecil swadaya sawit. Sebanyak 79% petani kecil swadaya sawit juga menerima pembayaran atas penjualan TBS pada saat transaksi. Hal ini sejalan dengan temuan Daemeter (2015) bahwa walaupun secara teknis petani kecil swadaya sawit bebas memilih agen untuk menjual TBS mereka namun pada umumnya petani kecil swadaya menjual TBS mereka ke satu agen/pembeli tetap. Tujuannya adalah untuk mengamankan penjualan TBS karena karakteristik TBS yang harus dijual dalam waktu 24-48 jam setelah panen.

Terlepas dari persoalan rendahnya kualitas TBS petani kecil swadaya sawit, panjangnya rantai pasokan yang menghubungkan petani kecil swadaya ke pabrik kelapa sawit dibandingkan dengan petani lainnya yang dapat terhubung langsung berimplikasi pada harga yang diterima petani kecil swadaya lebih rendah karena

besarnya variasi biaya transaksi dan rentan terhadap permainan harga (Daemeter 2015). Hanya 11% petani dalam penelitian ini yang memiliki akses untuk menjual TBS langsung ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sebagian besar petani kecil swadaya sawit mengandalkan agen/tengkulak untuk membeli TBS mereka, berbeda dengan petani besar yang dapat mengontrol penjualan TBSnya ataupun petani plasma yang memiliki akses ke PKS. Inobu (2016) menemukan bahwa jarang sekali petani kecil swadaya sawit yang menjual TBS langsung ke pabrik kelapa sawit.

Meskipun petani kecil swadaya sawit dapat mengamankan penjualan TBSnya kepada pembeli dan hampir semua (94%) petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pembeli tetap namun harga yang ditetapkan pembeli dalam hal ini pengepul/tengkulak/agen dan pabrik kelapa sawit belum sesuai dengan harapan 75% petani kecil swadaya sawit (Tabel 5). Angka ini menunjukkan ketidakpuasan petani kecil swadaya sawit terhadap harga jual TBS yang diterima. Hal ini ditambah dengan rata-rata jarak lahan petani ke PKS yang cukup jauh yakni 18,91 km (Tabel 2) dengan 61% infrastruktur jalan yang belum memadai (Tabel 4) sehingga sulit dilalui kendaraan dan menjadikan biaya transportasi lebih tinggi. Sementara itu, kualitas TBS yang tidak langsung masuk ke pabrik akan menurun dan pada akhirnya berimplikasi pada harga jual TBS yang lebih rendah. Semua ini kembali menjadi beban bagi petani yang mengurangi pendapatan mereka dari hasil penjualan TBS.

4. Akses Dana Terbatas

Tabel 6. Variabel dan Deskripsi Akses Dana

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Dana Sendiri	1 = Ya ; 0 = Tidak	94

2	Pinjaman dari keluarga/kerabat/teman	1 = Ya ; 0 = Tidak	22
3	Pinjaman dari bank/koperasi/lembaga keuangan lainnya	1 = Ya ; 0 = Tidak	17
4	Pinjaman dari pengepul TBS	1 = Ya ; 0 = Tidak	25

Sumber: Data Primer (2019)

Hampir seluruh petani kecil swadaya (94%) mengusahakan kebun sawit dengan dana mandiri (*self funding*) dan sebagian kecil (6%) mendapatkan pendanaan dari pinjaman. Hasil survei juga menunjukkan terdapat proporsi petani yang menggunakan pendanaan campuran (*mix funding*) baik dari dana sendiri dan sumber lain. Terdapat 22 – 25% yang memiliki pendanaan campuran (*mix funding*) dari sumber pinjaman informal seperti keluarga/teman dan tengkulak. Jumlah petani yang mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal seperti bank/koperasi/lembaga keuangan lainnya lebih sedikit yakni hanya 17%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sahara et al (2018) yang menunjukkan bahwa sejumlah petani kecil swadaya sawit mengakses pinjaman informal melalui pedagang lokal (tengkulak/pengepul TBS) karena walaupun nilai/jumlahnya terbatas namun petani tidak diberi persyaratan khusus seperti periode kredit/tenor, biaya ataupun bunga dan hanya sebatas perjanjian lisan. Skema pembiayaan ini mudah dan terjangkau bagi petani kecil swadaya karena untuk pembayarannya pun dapat dilakukan petani setiap kali menjual TBS.

Terdapat petani kecil swadaya mencari pinjaman langsung ke bank/lembaga keuangan namun hanya sebagian kecil dari aplikasi pengajuan kredit petani sawit disetujui oleh bank/lembaga keuangan karena petani tidak memenuhi uji kelayakan yang disyaratkan bank (Sahara et al. 2018). Hutabarat (2017) juga menemukan bahwa lembaga keuangan umumnya tidak memberikan pinjaman

kepada petani kecil swadaya sawit karena risiko gagal bayar yang dianggap cukup besar. Petani umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada kelebihan pendapatan untuk dapat membayar cicilan atau bunga pinjaman. Kondisi yang dihadapi petani kecil swadaya sawit sedikit berbeda dengan petani plasma yang dapat mengakses pinjaman melalui koperasi dan perusahaan inti sawit ataupun ke bank dengan penjamin yakni koperasi atau perusahaan. Daemeter (2015) menyatakan bahwa petani kecil swadaya hanya dapat mengakses pinjaman informal dari agen (tengkulak/pengepul) atau juga berpotensi untuk mendapatkan pinjaman dari credit union setempat. Inobu (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa hanya 13,8% petani memiliki tabungan di bank dan hanya 7,7% memiliki akses terhadap pinjaman bank. Hasil diatas menunjukkan jika petani kecil swadaya sawit memiliki akses dana untuk pinjaman/pendanaan yang terbatas.

5. Daya Beli Input Produksi Rendah

Tabel 7. Variabel dan Deskripsi Daya Beli Kebutuhan Budidaya

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Harga bibit unggul kelapa sawit tidak terjangkau	1 = Ya ; 0 = Tidak	70
2	Harga pupuk kelapa sawit tidak terjangkau	1 = Ya ; 0 = Tidak	65
3	Dana tidak mencukupi untuk mengelola kebun	1 = Ya ; 0 = Tidak	72

Sumber: Data Primer (2019)

Bagi 70% petani kecil swadaya sawit menilai harga bibit kelapa sawit tidak terjangkau dan 65% menilai harga pupuk tidak terjangkau. Sebanyak 72% petani menyatakan jika dana yang mereka gunakan yang sebagian besar bersumber dari dana mandiri (Tabel 6) tidak mencukupi untuk mengelola kebun sawit mereka. Petani kecil swadaya sawit tidak hanya mengeluhkan harga bibit unggul dan pupuk yang mahal tetapi juga akses ketersediaan pupuk yang juga tidak mudah didapatkan oleh petani kecil swadaya sawit. Hal tersebut menjadi kendala bagi petani sehingga tidak dapat memenuhi praktik budidaya yang baik sesuai dengan standar seharusnya.

Dengan dana mandiri maupun dana campuran (*mix funding*) yang dimiliki saat ini, 72% petani menyatakan jika dana tersebut tidak mencukupi untuk mengelola kebun sawit termasuk kendala untuk pengadaan bibit unggul dan pupuk. Modal kerja yang terbatas dan pendapatan dari penjualan TBS yang berfluktuasi berimplikasi pada daya beli input produksi rendah sementara harga input produksi seperti bibit dan pupuk tinggi. Hal ini menjadi lebih kompleks lagi karena akses bibit dan pupuk juga sangat terbatas bagi petani kecil swadaya sawit sehingga sekalipun bagi sebagian petani (30-35%) dapat membeli input produksi namun terkendala bibit dan pupuk yang sulit diperoleh. Hasil ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yakni mayoritas petani swadaya di wilayah yang diteliti Sahara et al. (2018) menghadapi kendala modal untuk membeli input berkualitas tinggi seperti bibit bersertifikat. Kemampuan finansial petani swadaya yang rendah menyebabkan pengadaan faktor produksi tidak bisa dipenuhi sesuai dengan standar yang seharusnya (Hutabarat 2017a). Hutabarat (2017a) menyatakan bahwa akses input produksi seperti bibit unggul dan pupuk harganya cukup mahal dan sangat sulit diperoleh. Pada umumnya rantai pasok pupuk hanya diperoleh melalui saluran-saluran tertentu seperti perusahaan perkebunan, koperasi dan agen-agen yang terbatas. Inobu (2016) menemukan bahwa sumber utama dari sebagian besar petani swadaya untuk mendapatkan pupuk adalah melalui pengepul/tengkulak yang membeli TBS petani.

6. Praktek Budidaya Yang Baik (*Good Agricultural Practice*) Rendah

Tabel 8. Variabel dan Deskripsi Praktek Budidaya Yang Baik (*Good Agricultural Practice*)

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Menanam bibit kelapa sawit bersertifikat	1 = Ya ; 0 = Tidak	35
2	Melakukan pemupukan rutin	1 = Ya ; 0 = Tidak	50
3	Memanen hanya TBS yang layak panen (sudah membrodol)	1 = Ya ; 0 = Tidak	94
4	Meremajakan/replanting tanaman tua	1 = Ya ; 0 = Tidak	51
5	Paham tentang ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)	1 = Ya ; 0 = Tidak	25

Sumber: Data Primer (2019)

Terdapat 35% petani kecil swadaya sawit yang telah menanam bibit kelapa sawit bersertifikat atau bibit yang direkomendasikan. Sebanyak 50% petani kecil swadaya sawit melakukan perawatan berupa pemupukan rutin sesuai dengan usia tanaman kelapa sawit dan dosis anjuran minimal pemupukan 2x dalam setahun. Hampir semua (94%) petani kecil swadaya sawit memanen hanya TBS yang layak panen yakni yang sudah ada brondolan serta 51% mengaku meremajakan/replanting tanaman sawit yang sudah tua. Terdapat 25% petani kecil swadaya sawit yang mengaku paham dengan *Indonesia Sustainable Palm Oil*

(ISPO). Dari survei ini menunjukkan bahwa petani kecil swadaya sawit sudah mulai memiliki kesadaran/*awareness* untuk melakukan praktik budidaya yang baik dengan menanam bibit kelapa sawit bersertifikat, melakukan pemupukan rutin, memanen sesuai dengan standar perusahaan pengolahan kelapa sawit. Namun demikian daya beli input produksi yang rendah (Tabel 7) dan kendala akses tersedianya bibit dan pupuk di kalangan petani kecil swadaya sawit menjadikan persentase petani yang menanam bibit kelapa sawit bersertifikat dan melakukan pemupukan rutin masih cukup minim.

Imbas dari rendahnya praktek budidaya yang baik adalah produksi TBS petani kecil swadaya rata-rata berkisar 1,73 ton per bulan untuk luas areal rata-rata 2,35 hektar sehingga produktifitas TBS adalah 0,74 ton/Ha/bulan atau 8,8 ton/Ha/tahun (Tabel 2). Hasil ini sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata umur tanaman sawit 12,26 tahun yakni tergolong sebagai tanaman remaja dengan produksi ideal 28 ton/ha/tahun jika berasal dari bibit unggul dan menerapkan kultur teknis/GAP yang baik (Pahan 2012). Hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan bahwa petani kecil swadaya sawit pada dasarnya sudah memiliki kesadaran/*awareness* untuk melakukan praktik budidaya yang baik namun penerapan GAP secara menyeluruh oleh semua petani kecil swadaya sawit belum tercapai karena terkendala biaya/dana dan akses tersedianya bibit dan pupuk di kalangan petani kecil swadaya sawit. Oleh karena itu, rendahnya produktifitas petani kecil swadaya sawit karena GAP yang buruk menjadi suatu tantangan yang harus dibenahi tidak hanya dengan menuntut petani kecil swadaya sawit untuk memenuhi kultur teknis/GAP yang baik tetapi juga dengan memberikan perlindungan harga jual, dukungan dana/modal, akses dana dan akses input produksi guna mempermudah petani swadaya untuk mengakses input produksi yang umumnya hanya bisa diakses oleh perusahaan perkebunan swasta/BUMN dan organisasi tertentu seperti asosiasi/koperasi/kelompok petani.

7. Kurangnya Kebijakan atau Intervensi Pemerintah Yang Diterima Petani

Tabel 9. Variabel dan Deskripsi Kebijakan atau Intervensi Pemerintah Yang Diterima Petani

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Pemerintah telah menetapkan harga jual sawit (TBS) yang menguntungkan bagi petani	1 = Ya ; 0 = Tidak	37
2	Saya pernah mengikuti sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi lahan bagi petani sawit	1 = Ya ; 0 = Tidak	34
3	Pemerintah memberi kemudahan bagi para petani untuk mendapatkan sertifikat lahan/legalitas lahan	1 = Ya ; 0 = Tidak	52
4	Saya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk pengelolaan kebun sawit saya	1 = Ya ; 0 = Tidak	8
5	Saya mendapatkan penyuluhan dari pemerintah tentang cara dan syarat mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan pertanian sawit	1 = Ya ; 0 = Tidak	16
6	Saya pernah mendapatkan bantuan pemerintah berupa penyediaan/	1 = Ya ; 0 = Tidak	16

	subsidi untuk bibit unggul sawit		
7	Saya pernah mendapatkan bantuan pemerintah berupa penyediaan/bantuan/subsidi pupuk	1 = Ya ; 0 = Tidak	26
8	Saya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk meremajakan tanaman sawit yang sudah tua	1 = Ya ; 0 = Tidak	4
9	Pemerintah (aparatur desa, kecamatan, pemerintah kabupaten dan provinsi) memberikan perlindungan (perlindungan harga, jaminan subsidi pupuk, akses ke Pabrik Kelapa Sawit) terhadap petani sawit dengan baik dalam rangka mendukung petani sawit.	1 = Ya ; 0 = Tidak	16
10	Pemerintah telah memperbaiki infrastruktur berupa jalan/jembatan di wilayah kami sehingga mempermudah akses	1 = Ya ; 0 = Tidak	62

Sumber: Data Primer (2019)

Sebanyak 37% petani kecil sawit swadaya menilai pemerintah telah menetapkan harga jual sawit yang menguntungkan bagi petani. Harga TBS pada saat survei ini dilakukan adalah Rp. 1.304,46/kg dan dinilai sebagian besar petani cukup menguntungkan (Tabel 2). Sebanyak 52% petani menilai pemerintah memberi kemudahan bagi petani untuk mendapatkan sertifikat/legalitas lahan dan

62% petani menyatakan pemerintah telah memperbaiki infrastruktur berupa jalan/jembatan sehingga memudahkan akses. Terdapat 34% mengaku pernah mengikuti sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi lahan dan 26% petani mengaku pernah mendapatkan bantuan berupa penyediaan/subsidi pupuk. Penyuluhan dari pemerintah tentang cara dan syarat mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan pertanian sawit pernah diikuti oleh 16% petani. Demikian halnya, hanya 16% petani yang pernah mendapatkan bantuan pemerintah berupa penyediaan/subsidi bibit unggul sawit. Pemerintah dinilai telah memberikan perlindungan harga, jaminan subsidi pupuk dan akses ke pabrik kelapa sawit oleh 16% petani. Sejumlah kecil petani (4%) mengaku mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk meremajakan tanaman sawit yang sudah tua.

Hasil penelitian ini menunjukkan, intervensi pemerintah yang diterima oleh para petani kecil swadaya sawit masih rendah. Hanya 4% petani kecil swadaya sawit yang pernah mendapatkan bantuan dana *replanting*, 8% petani yang pernah mendapatkan bantuan dana untuk pengelolaan/perawatan sawit, 16% petani pernah mendapatkan bantuan bibit unggul dan 26% petani pernah mendapatkan bantuan pupuk. 16% petani pernah mengikuti sosialisasi penyuluhan tentang cara dan syarat mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan pertanian sawit dan 34% pernah mengikuti penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi lahan bagi petani sawit. 37% petani menilai pemerintah telah menetapkan harga TBS yang menguntungkan bagi petani namun demikian hanya 16% yang menilai pemerintah telah memberikan perlindungan (harga, jaminan subsidi pupuk, akses ke pabrik kelapa sawit) terhadap petani sawit dalam rangka mendukung petani sawit. Intervensi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur jalan/jembatan di wilayah petani telah dirasakan manfaatnya oleh 62% petani. Hal ini menunjukkan bahwa baik bantuan dana, bantuan input produksi ataupun sosialisasi/penyuluhan yang menjangkau hingga ke petani kecil swadaya sawit serta penetapan dan perlindungan harga TBS belum maksimal karena belum menjangkau sebagai besar petani kecil swadaya sawit. Untuk mewujudkan petani kecil swadaya sawit yang memenuhi GAP guna mengoptimalkan produktifitasnya menjadi mustahil

untuk dicapai tanpa dukungan yang lebih optimal dari semua pihak terkait khususnya dari pemerintah.

Tantangan Kelembagaan: Ketersediaan Organisasi bagi Petani Kecil Swadaya Sawit Terbatas

1. Keikutsertaan Dalam Organisasi Petani Sawit

Tabel 10. Keikutsertaan Petani Dalam Organisasi Petani Sawit

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Petani berorganisasi	22,94
2	Petani tidak berorganisasi	77,06
TOTAL		100

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan hasil survei, terdapat 22,94% petani yang tergabung dalam organisasi petani dan 77,06% petani tidak bergabung. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani kecil swadaya sawit tidak bergabung dalam organisasi petani sawit. Disisi lain, bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk petani sawit disalurkan tidak secara langsung kepada petani sawit melainkan melalui kelembagaan petani seperti koperasi/asosiasi ataupun melalui perusahaan yang memiliki kontrak kerjasama dengan petani/kelompok tani. Hal ini menjadikan posisi sebagian besar (77,06%) petani kecil swadaya sawit lebih lemah karena tidak memiliki akses penting untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah. Sehingga tidak mengherankan jika hanya sebagian kecil petani kecil swadaya sawit dalam penelitian ini yang pernah menerima bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk penyuluhan, input produksi maupun dana (Tabel 9).

2. Alasan Tidak Bergabung dalam Organisasi Petani Sawit

Tabel 11. Alasan Tidak Bergabung dalam Organisasi Petani Sawit

No	Keterangan	Persentase (%)
-----------	-------------------	-----------------------

1	Belum ada organisasi petani kelapa sawit	46,44
2	Memilih untuk mandiri/tidak bergabung	30,95
3	Tidak diikutsertakan oleh organisasi setempat	4,76
4	Ketidaktahuan akan adanya organisasi petani kelapa sawit	4,76
5	Tidak memberi penjelasan	13,09
TOTAL		100

Sumber: Data Primer (2019)

Pertanyaan terbuka yang diberikan kepada para petani kecil swadaya sawit yang tidak bergabung dalam organisasi petani sawit menghasilkan lima jawaban seperti yang tercantum dalam Tabel 11 diatas. Dari hasil ini diperoleh informasi alasan sebagian besar petani (46,44%) tidak bergabung dalam organisasi petani adalah karena belum adanya organisasi petani kelapa sawit di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan ketersediaan organisasi bagi petani kecil swadaya sawit masih terbatas. Terdapat 30,95% memilih untuk tidak bergabung, 4,67% tidak bergabung karena tidak diikutsertakan oleh pengelola, 4,76% tidak bergabung karena ketidaktahuan dan sisanya sebanyak 13,09% petani tidak memberi alasan/penjelasan apapun. Sebanyak 30,95% petani kecil swadaya sawit memang memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi petani karena merasa masih mampu untuk mengelola kebunnya secara mandiri ataupun karena merasa keikutsertaan dalam organisasi pekebun tidak memberikan keuntungan dan 13,09% lainnya tidak memberikan penjelasan tentang alasan tidak bergabung.

Hasil survei menunjukkan alasan terbesar tidak bergabungnya petani kecil swadaya sawit dalam organisasi petani sawit adalah karena belum adanya organisasi petani kelapa sawit di daerah mereka, tidak diikutsertakan dan tidak mengetahui adanya organisasi petani kelapa sawit. Hal ini menunjukkan jika petani kecil swadaya sawit tidak berorganisasi bukan karena enggan untuk bergabung. Dengan demikian terdapat 55,96% petani kecil swadaya sawit potensial untuk dapat bergabung dalam kelembagaan petani sawit (no 1, 3 dan 4 pada Tabel 11). Hasil ini mengindikasikan bahwa petani kecil swadaya sawit

kemungkinan semakin menyadari pentingnya bagi mereka untuk berorganisasi. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik kelapa sawit yang berbeda dari komoditi pertanian lainnya seperti kebutuhan lahan yang relatif luas, biaya investasi yang besar dan kebutuhan alat pertanian serta hasil panen yang tidak dapat diolah sendiri melainkan harus diolah di Pabrik Kelapa Sawit dalam rentang waktu maksimum 24-48 jam setelah panen. Dengan karakteristik seperti ini maka dibutuhkan akses input, akses finansial, akses pasar, keterampilan manajerial, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai bagi para petani kecil swadaya yang menurut penelitian lebih memungkinkan dicapai apabila petani bergabung dalam organisasi pekebun (Sahara et al 2018).

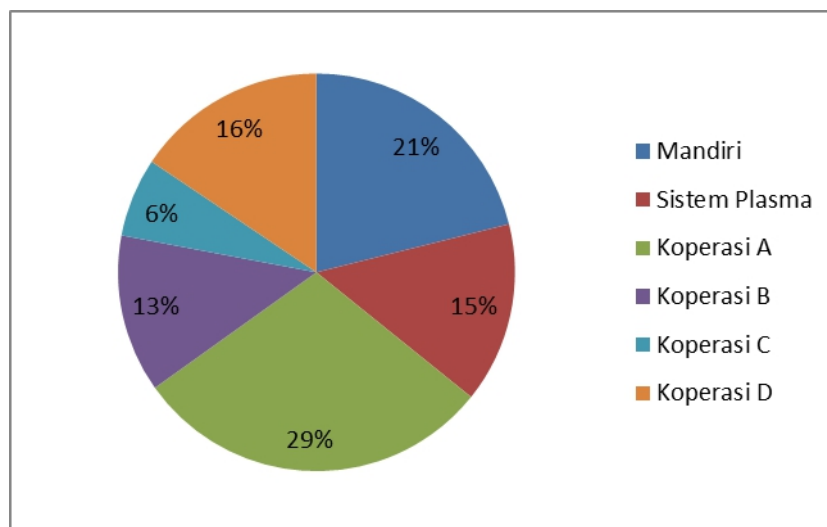
3. Model Kelembagaan Yang Diinginkan Petani

Pada bagian ini, survei dilakukan dengan memberikan tujuh (7) pilihan model kelembagaan bagi petani kelapa sawit sebagai berikut:

- 1) Mandiri, tidak bergabung dalam kelembagaan pekebun apapun.
- 2) Sistem plasma, kemitraan petani dengan perusahaan/pabrik kelapa sawit
- 3) Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola secara mandiri oleh para petani kelapa sawit (Koperasi A)
- 4) Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh pemerintah desa setempat (Koperasi B)
- 5) Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit (Koperasi C)
- 6) Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat / LSM (Koperasi D)
- 7) Model kelembagaan lainnya yang diusulkan petani:

Dari ketujuh pilihan diatas, secara berurutan, 29% petani memilih model kelembagaan Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola secara mandiri oleh para petani kelapa sawit (Koperasi A), 21% petani memilih menjadi petani mandiri yang tidak bergabung dalam kelembagaan pekebun apapun, 16% petani

memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat / LSM (Koperasi D), 15% memilih sistem plasma, 13% memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh pemerintah desa setempat (Koperasi B), 6% memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit (Koperasi C) dan tidak ada usulan untuk model kelembagaan lainnya.



Sumber: Data Primer (2019)

Gambar 3. Model Kelembagaan Pekebun Yang Diinginkan Petani

Dari perspektif petani kecil swadaya sawit, organisasi yang dikelola secara mandiri oleh petani kelapa sawit menjadi pilihan utama (29%) dibandingkan dengan koperasi petani yang dikelola oleh LSM (16%), sistem plasma (15%), organisasi petani yang dikelola oleh pemerintah desa setempat (13%) ataupun perusahaan/pabrik kelapa sawit (6%) yang paling sedikit dipilih oleh petani. Terdapat 21% petani kecil swadaya sawit memilih untuk mandiri/tidak bergabung dalam organisasi petani. Model kelembagaan yang paling banyak dipilih petani kecil swadaya sawit dalam penelitian ini adalah organisasi yang dimiliki dan dikelola oleh petani kecil swadaya sawit yang dipilih oleh 29% responden. Model ini kemungkinan yang dinilai petani kecil swadaya sawit sebagai lembaga yang paling potensial untuk menjawab tantangan petani, membawa kesejahteraan yang

terbaik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan dibandingkan dengan model kelembagaan lainnya yang kurang difavoritkan. Penelitian Suharno et al. (2015) di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dikelola oleh koperasi milik petani merupakan pola yang paling menguntungkan dibandingkan pola kemitraan yang dikelola oleh perusahaan atau oleh petani individual. Sedikitnya petani yang memilih model organisasi yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit mengindikasikan rendahnya kepercayaan petani kecil swadaya sawit pada perusahaan kelapa sawit. Gunawan et al. (2018) menemukan bahwa dari tiga pola kemitraan yakni Perkebunan Inti Rakyat (PIR), pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KPPA) dan Pola Satu Manajemen (PSM) maka pola KPPA dan PSM yang dikelola penuh oleh perusahaan sawit menjadi pola kemitraan yang menimbulkan banyak permasalahan sehingga membuat petani enggan untuk bergabung.

Solusi Yang Diharapkan Petani Kecil Swadaya Sawit

Pada kuesioner survei, petani kecil swadaya sawit diberikan pertanyaan terbuka berupa solusi yang diharapkan para petani kecil swadaya sawit baik secara umum maupun secara khusus dari pemerintah (pusat/daerah) dan dari perusahaan/pabrik kelapa sawit sebagai berikut:

Perlindungan Harga Jual TBS

Solusi pertama yang diharapkan petani kecil swadaya sawit kepada pemerintah adalah jaminan harga jual TBS yang stabil. Wildayana (2016) menjelaskan bahwa masing-masing daerah memiliki kebijakan dalam menentukan harga TBS sehingga terdapat perbedaan harga, hal ini juga yang menyebabkan rentannya terjadi permainan harga pada pekebun swadaya. Dalam penelitian tersebut, Wildayana (2016) menemukan bahwa sekalipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produksi TBS petani plasma dan petani swadaya namun petani plasma mendapatkan pendapatan yang berbeda nyata karena memperoleh harga

jual Rp. 1.434,00/kg TBS sementara petani swadaya mendapatkan harga jual Rp. 1.184,00/kg atau terdapat selisih Rp.250,00/kg TBS. Wildayana (2016) merekomendasikan agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga TBS untuk semua petani kelapa sawit.

Tersedianya Kelembagaan Petani Yang Memadai

Petani juga berharap pemerintah menjadikan harga pupuk dan benih lebih terjangkau dan mudah diakses oleh petani serta adanya subsidi berupa pupuk, obat-obatan kimia (*chemist*) dan benih bersertifikat bagi petani. Hal ini telah dilakukan pemerintah ataupun perusahaan dengan menyalurkan subsidi/bantuan kepada petani sawit melalui kelembagaan petani seperti asosiasi, koperasi, kelompok tani namun yang menjangkau petani kecil swadaya sawit masih sangat minim karena sebagian besar petani kecil swadaya sawit belum tergabung dalam suatu organisasi petani sawit. Menurut Pramudya et al (2015), akses pasar, akses input produksi seperti akses bibit bersertifikat dan pupuk bersubsidi mungkin hanya dapat diperoleh melalui organisasi petani. Dengan demikian, permasalahan perekonomian petani dapat diatasi melalui dukungan akses terhadap sumber daya dan modal serta meningkatkan kualitas produksi salah satunya dengan penguatan fungsi kelembagaan petani (Pramudya et al 2015). Sibarani et al. (2015) menjelaskan manfaat jika petani memiliki kelompok tani atau bergabung dalam koperasi khususnya koperasi yang sesuai dengan standar ISPO seperti petani memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi ISPO, melalui koperasi petani diarahkan untuk melakukan praktek budidaya kelapa sawit yang tepat, koperasi dapat menyediakan akses input, akses finansial, akses pasar khususnya informasi harga buah sawit secara transparan bagi petani.

Kelembagaan petani sangat krusial dalam menyediakan informasi bagi petani seperti informasi harga TBS, harga input dan teknologi yang berhubungan dengan produksi kelapa sawit yang terbaru hingga koordinasi penjualan TBS dan komunikasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan dan pemerintah (Hidayat

2017). Ketika pemerintah menetapkan untuk menyalurkan dukungan dan bantuan kepada petani melalui lembaga/organisasi petani seharusnya pemerintah juga memastikan para petani khususnya petani kecil swadaya sawit memiliki akses kelembagaan/organisasi dan mendapatkan pemberdayaan terkait penguatan kelembagaan. Temuan dalam penelitian ini adalah sebagian besar petani kecil swadaya sawit tidak berorganisasi karena ketidakterediaan lembaga/organisasi petani di wilayah mereka. Dalam pembentukan ataupun penguatan kelembagaan petani maka diperlukan pendampingan intensif agar para petani kecil swadaya sawit mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang manajemen organisasi mengingat banyaknya koperasi/lembaga petani di Indonesia saat ini yang tidak aktif dan ditinggalkan anggotanya.

Akses ke PKS dan perbaikan infrastruktur

Petani kecil swadaya sawit mengharapkan dukungan dari perusahaan/pabrik kelapa sawit berupa akses yang lebih terbuka kepada petani swadaya agar petani swadaya dapat menjual TBS secara langsung kepada PKS, keterbukaan/transparansi timbangan pihak pabrik kelapa sawit sebagai pembeli dan adanya kesamaan harga antara pabrik satu dengan yang lainnya. Menurut Hutabarat (2017), petani swadaya menjadi sulit mendapatkan harga tinggi karena perusahaan pada umumnya menetapkan harga yang lebih rendah untuk TBS dari kebun swadaya. Lebih lanjut menurut Sahara et al (2018) petani swadaya menerima harga TBS lebih rendah dibandingkan petani plasma karena petani plasma memiliki kontrak resmi dengan perusahaan sawit dan mengikuti harga yang ditetapkan oleh Disbun provinsi.

Petani kecil swadaya sawit berharap pemerintah memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perkebunan sawit petani kecil swadaya sawit untuk mendukung proses transportasi yang lebih memadai serta dapat menekan biaya transportasi yang tinggi karena kondisi jalanan yang sulit dilalui kendaraan bermotor. Pemerintah telah melakukan perbaikan infrastruktur namun belum optimal karena sebagian besar (61%) kondisi infrastruktur jalan/jembatan belum memadai dan

terdapat perbaikan jalan masih dilakukan secara swadaya oleh para petani dengan mengeluarkan biaya sendiri yang cukup memberatkan bagi petani kecil swadaya sawit. Selain itu, kepada semua pihak yang berkepentingan, petani swadaya berharap agar lokasi PKS dapat lebih dekat dengan lokasi perkebunan petani kecil swadaya sawit untuk mengurangi biaya transportasi yang mahal. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi investor, perusahaan perkebunan dan pemerintah lokal/setempat (BUMD) untuk dapat membangun PKS di sekitar area petani sawit dan tidak tertutup kemungkinan organisasi/koperasi petani yang dikelola dengan baik dan mendapatkan dukungan dari semua pihak dapat memiliki PKS sendiri.

Penyuluhan Praktik Budidaya yang Baik

Petani kecil swadaya sawit mengharapkan dukungan dari semua pihak terkait dalam bentuk penyuluhan/pelatihan tentang budidaya sawit secara menyeluruh dari proses pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan hingga panen dan pasca panen. Dengan kondisi pendidikan petani kecil swadaya sawit yang rata-rata rendah yakni 39% lulus Sekolah Dasar (Gambar 2), dukungan berupa pelatihan dan penyuluhan mereka harapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang praktek budidaya sawit yang baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi sawit yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan yang diperoleh petani kecil swadaya sawit. Pengetahuan petani yang rendah tentang tanaman kelapa sawit menyebabkan perkebunan kelapa sawit dikelola dengan praktik-praktik budidaya yang kurang baik (Hutabarat 2017b). Namun hal ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan yang memadai bagi petani kecil swadaya sawit. Dalam penelitian ini petani kecil swadaya sawit mempertanyakan harga jual TBS yang berbeda-beda dalam wilayah dan perusahaan yang sama mengindikasikan petani belum memahami jika kondisi kebun yang berbeda (varietas bibit yang ditanam bermacam-macam dan perawatan yang seadanya) berimplikasi pada kualitas TBS yang dihasilkan akan bervariasi sehingga mempengaruhi harga jualnya. Dengan dukungan berupa penyuluhan praktik

budidaya yang baik dan meningkatkan kemampuan ekonomi petani kecil swadaya sawit maka para petani kecil swadaya sawit dapat melakukan langkah-langkah perbaikan dalam input produksinya sehingga dapat meningkatkan produktifitas hasil TBSnya. Kolaborasi pemerintah, perusahaan, LSM dan perguruan tinggi seharusnya membawa kontribusi nyata bagi kemajuan petani sawit Indonesia melalui proses pemberdayaan petani sawit.

D. STATUS LUARAN

Naskah penelitian telah dikirimkan ke Jurnal Agro Ekonomi, sebuah jurnal terakreditasi Sinta 2 dengan status *submitted* dan masih menunggu hasil *review*.

E. PERAN MITRA

Tidak Ada

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Kendala yang dialami dalam penelitian lebih pada kesulitan manajemen waktu peneliti dikarenakan berbagai kesibukan dalam kegiatan administrasi kampus sehingga proses penyelesaian memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, minimnya pengalaman peneliti dalam meneliti menjadi hambatan tersendiri sehingga membutuhkan banyak waktu untuk dapat belajar baik dari referensi dan mentor penelitian. Minimnya pengalaman meneliti ini juga menjadi kendala dalam menulis laporan penelitian dan artikel untuk dikirimkan ke jurnal ilmiah sehingga mengalami keterlambatan pengiriman ke jurnal terkait.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN

Dengan hasil penelitian yang ada maka rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian terkait pemberdayaan kelembagaan petani yang dapat dijadikan sebagai *pilot project* solusi untuk tantangan ekonomi

dan kelembagaan yang dihadapi oleh petani sawit di Indonesia. Pilot project ini rencananya akan menyoar ke salah satu wilayah sentra perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani di Sumatera Utara (Labusel).

H. DAFTAR PUSTAKA

- Agustira MA, Amalia R, Nurkhoiry R. 2015. Program Sawit Untuk Rakyat (PROWITRA) sebagai upaya peningkatan produktivitas, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun kelapa sawit rakyat. Prosiding Seminar Nasional “Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian dalam Rangka Pencapaian Kemandirian Pangan Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Petani”: 315-24. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- [Daemeter] Daemeter Consulting. 2015. Indonesia oil palm smallholder farmers: a typology of organizational models, needs, and investment opportunities. Bogor (ID): Daemeter Consulting
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit 2018 – 2020 Jakarta (ID): Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
- Effendi S. 2012. Metode penelitian survei (edisi revisi 2012). Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Gunawan, Talman P, Tirayoh J, Andri M, Syamsitro Z. 2018. Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan Sawit. Bogor (ID): Serikat Petani Kelapa Sawit.
- Hidayat NK. 2017. Tinjauan Buku: menghidjaukan sektor sawit melalui petani, lesson-learned Hivos untuk isu sawit berkelanjutan. Masyarakat Indonesia 43(1): 143-149

- Hidayat NK, Offermans A, Glasbergen P. 2016. On the profitability of sustainability certification: An analysis among Indonesian Palm Oil Smallholders. *Journal of Economics and Sustainable Development* 7(12): 45-62.
- Hutabarat S. 2017a. Tantangan keberlanjutan pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam perubahan perdagangan global. *Masyarakat Indonesia* 43(1): 47-64.
- Hutabarat S. 2017b. ISPO certification and Indonesian oil palm competitiveness in global market smallholder challenges toward ISPO certification. *Agro Ekonomi* 28(2): 170-188
- Idsert J dan Schoneveld GC. 2016. Mewujudkan petani kecil sawit mandiri yang lebih produktif dan berkelanjutan di Indonesia. Working Paper 217. Bogor (ID): CIFOR
- [INOBU] Institut Penelitian Inovasi Bumi. 2016. Seluk beluk pekebun kelapa sawit dan tantangan budidaya sawit secara swadaya: studi kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia. Jakarta (ID): Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU).
- Kubitza C, Krishna VV, Alamsyah Z, Qaim M. 2018. The economics behind an ecological crisis: livelihood effects of oil palm expansion in Sumatra, Indonesia. *Human Ecology* (2018) 46:107-116
- Naylor RL, Higgins MM, Edwards RB, Falcon WP. 2019. Decentralization and the environment: assessing smallholder oil palm development in Indonesia. Royal Swedish Academy of Sciences 2019.

Pahan I. 2012. *Manajemen Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Jakarta (ID): Penebar Swadaya

Pohan M. 2015. Dampak penurunan harga sawit terhadap kesejahteraan petani sawit di pantai timur Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan* 15(2): 113-129

Pramudya EP, Prawoto A, Hanifa R. 2015. *Menghijaukan sektor sawit melalui petani, lesson-learned Hivos untuk isu sawit berkelanjutan*. Jakarta (ID): ReneBook.

Sahara S, Haryadi H, Kusumowardhani N. 2018. *Pembiayaan bagi petani kecil di sektor kelapa sawit: analisis kesenjangan antara skema kredit yang tersedia dan pembiayaan yang dihadapi petani kecil*. Infobrief No. 214. Bogor, Indonesia: CIFOR

Saputra IMGD, Anggreni IGAAL, Dharma IP. 2017. Pola kemitraan usaha tani kelapa sawit kelompok tani telaga biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. *E-jurnal Agribisnis dan Agrowisata* 6 (2) : 249-258

Sibarani DYT, Hutabarat S, Dewi N. 2015. Prospek dan tantangan petani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam menghadapi sertifikasi ISPO. *Jom Faperta* 2(1): 1-15.

Suharno, Yuprin, AD., Barbara, B. 2015. Analisis kinerja usahatani perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pola kemitraan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Agribisnis Indonesia* 3 (2) : 135 – 144

Sukardi. 2017. *Metodologi penelitian pendidikan: kompetensi dan praktiknya*. Jakarta (ID): Penerbit Bumi Aksara

Wildayana E. 2016. Pendekatan pengendalian fluktuasi harga tandan buah segar terhadap pendapatan petani kelapa sawit. Jurnal Habitat 27(3): 103-108

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rincian Penggunaan Keuangan

1. Honorarium			
Honor	Tanggal	Kuantitas	Jumlah harga (Rp)
Asisten Penelitian	27 Desember 2019	1 orang x Rp.	300.000

		300.000,00	
Asisten Penelitian	24 Januari 2020	1 orang x Rp. 300.000,00	300.000
Asisten Penelitian	17 Maret 2020	1 orang x Rp. 300.000,00	300.000
Asisten Penelitian	10 September 2020	1 orang x Rp. 100.000,00	100.000
SUB TOTAL (Rp)			1.000.000
2. Pembelian bahan habis pakai			
Material	Tanggal	Kuantitas	Jumlah harga (Rp)
Fotocopy Kuesioner	2 Desember 2019		222.000
Fotocopy Kuesioner	2 Desember 2019		37.000
Pulsa telepon - Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner	26 Desember 2019	131 kuesioner x Rp. Rp. 10.000	1.310.000
Koordinasi Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner – BTP D3 BLU Tingkat 1 (Fajar Alamsyah)	26 Desember 2019	1 orang x Rp. Rp. 50.000	50.000
Koordinasi Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner – AKUNTANSI BLU Tingkat 1 (Beni Hariadi)	9 Januari 2020	1 orang x Rp. 50.000	50.000
Koordinasi Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner – BTP BLU Tingkat 3 (Dian N Anisa)	10 Januari 2020	1 orang x Rp. 50.000	50.000
Pengujian Kuesioner dan Koordinasi Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner – TKM BLU Tingkat 3 (Ropitah)	13 Januari 2020	1 orang x Rp. 100.000	100.000
Koordinasi Pembagian Kuesioner – Dosen BTP (Saktiono S)	13 Januari 2020	1 orang x Rp. 100.000	100.000

Kuesioner dan Koordinasi Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner – TKM BLU Tingkat 1 & 2 (Handoko)	13 Januari 2020	1 orang x 2 kelas x Rp. 50.000	100.000
Kuesioner dan Koordinasi Penyebaran & Pengumpulan Kuesioner – AKT BLU Tingkat 2 (Kamal Aji)	13 Januari 2020	1 orang x 1 kelas x Rp. 50.000	50.000
Pre-survey 2x, pengujian, kuesioner dan koordinasi pengumpulan kuesioner – AKT BLU Tingkat 3 (Ari Setyawan)	2 Februari 2020	1 orang x Rp. 200.000,00	200.000
Reward pengisian kuesioner – Verli Arlita	10 Januari 2020	1 orang x Rp. 100.000	100.000
Reward pengisian kuesioner – M Halim Yahya	10 Januari 2020	1 orang x Rp. 100.000	100.000
Reward pengisian kuesioner – Dian Nur anisa	10 Januari 2020	1 orang x Rp. 100.000	100.000
Reward pengisian kuesioner – Putri Wahyuni	13 Januari 2020	1 orang x Rp. 100.000	100.000
Reward pengisian kuesioner – Tika Afisah	13 Januari 2020	1 orang x Rp. 100.000	100.000
SUB TOTAL (Rp)			2.769.000
3. Peralatan penunjang			
Material	Tanggal	Kuantitas	Jumlah harga (Rp)
HVS SD A4/70 GSM	2 Januari	1 rim	38.200
BK GK HC F/100	2 Januari	1	15.400
BK KIKI HC Q/200	2 Januari	2	42.000
BK KIKY HC Q/100	2 Januari	2	22.600
POST IT PRONTO MINI	2 Januari	1	20.500

POST IT PRONTO 655	2 Januari	2	23.000
TAPE NACHI MASK	2 Januari	2	8.000
PP CLIP VIEC VINYL	2 Januari	2	6.000
B CLIP VTEC 200	2 Januari	2	20.400
B CLIP MONTANA 111	2 Januari	4	20.000
B CLIP V-TRO 155	2 Januari	3	22.500
B CLIP MONTANA BC 260	2 Januari	1	18.000
TIME TABLE BESAR	2 Januari	1	10.900
TS SL/PPL 58X48	2 Januari	6	125.400
BATT ABC BIRU R6/K	2 Januari	7	374.500
DESK ORGANIZER VIEC	2 Januari	1	82.000
CASHBOX KENKO	2 Januari	1	150.000
SUB TOTAL (Rp)			999.400
4. Perjalanan			
Material	Tanggal	Kuantitas	Jumlah harga (Rp)
Transportasi Kendaraan & Bensin	7 Desember 2019	1	100.000
Transportasi Kendaraan & Bensin	28 Juni 2020	1	150.000
SUB TOTAL (Rp)			250.000
5. Lain-lain			
Material	Tanggal	Kuantitas	Jumlah harga (Rp)
Materai 6000	5 Desember 2019	5 x Rp. 6500	32.500
Materai 3000	5 Desember 2019	5 x Rp. 3300	16.500
Pen selera	5 Desember 2019	2 x Rp. 3500	7.000
Pen standard	5 Desember 2019	4 x Rp. 2500	10.000
Pen boldliner	5 Desember 2019	1 x Rp. 15.000	15.000
Stopmap	5 Desember 2019	2 x Rp. 1500	3000
Kwitansi	5 Desember 2019	1 x Rp. 3000	3000
Map L	5 Desember 2019	7 x Rp. 2500	17.500
Tas map	5 Desember 2019	1 x Rp. 15.000	15.000
Notes	5 Desember 2019	1 x Rp. 10.000	10.000
Binder clip 111	5 Desember 2019	12 x Rp. 500	6.000

Binder clip 200	5 Desember 2019	10 x Rp. 1000	10.000
Amplop	10 Desember 2019	2 x Rp. 8.700	17.400
Pajak Honor Asisten Penelitian		5% x Rp. 1.000.000	50.000
Jilid & Fotocopy Laporan		2 rangkap	70.000
SUB TOTAL (Rp)			282.900
TOTAL BIAYA YANG DIKELUARKAN (Rp)			5.301.300
TOTAL DANA DITERIMA			5.300.000
KEKURANGAN DANA			(1.300)

2. Catatan Harian/Logbook

Waktu	Kegiatan Penelitian	Keterangan /Hasil
Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal disetujui - Rekrut Asisten & Koordinator Penelitian tahap awal: Zazilatul dan Ary Setyawan - Diskusi dan Konsultasi dengan mentor penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Saran mentor: Untuk rumusan masalah 4 dan 5, perlu data petani yang berorganisasi dan tidak berorganisasi dalam jumlah yang sama Untuk metode penelitian: perlu wawancara mendalam (kualitatif) dan FGD
September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Survey awal untuk mendata : petani yang berorganisasi - Penerimaan Dana Penelitian - Perubahan Judul, Tujuan dan Rumusan Masalah - Diskusi dan Konsultasi dengan mentor penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Dari 90 mahasiswa anak petani sawit yang disurvei, hanya 11 orang yang orang tuanya bergabung dalam organisasi petani sehingga kurang memungkinkan untuk melakukan perbandingan - Saran konsultan: perubahan/modifikasi topic penelitian sesuai dengan responden dan ketersediaan dana
Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kuesioner - Diskusi dan Konsultasi dengan mentor penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Draft kuesioner 1 revisi
November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Kuesioner - Diskusi dan Konsultasi dengan mentor penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi Kuesioner
Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebaran Kuesioner - Pengumpulan Kuesioner - Seleksi hasil kuesioner 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuesioner disebar dan terkumpul kembali - Hasil Sortasi/seleksi kuesioner yang terisi lengkap - Eliminasi kuesioner yang tidak terisi lengkap
Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Input dan Tabulasi data - Skoring data - Studi Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil tabulasi data pada program excel - Hasil skoring pada program excel
Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Data - Studi pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan data pada program excel
Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa Data - Studi Pustaka - Konsultasi mentor penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa ringkas data hasil pengolahan
April 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan penelitian - Studi Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan draft laporan penelitian 50% (belum selesai)

Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan penelitian - Studi Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Draft laporan penelitian lengkap dikirim ke mentor penelitian untuk review
Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan penelitian - Studi Pustaka - Konsultasi mentor penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan penelitian perlu direvisi pada bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan
Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi laporan penelitian - Studi Pustaka - Konsultasi mentor penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan penelitian perlu direvisi pada bagian hasil dan pembahasan
Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi laporan penelitian - Studi Pustaka - Konsultasi mentor penelitian - Penyusunan naskah publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan penelitian akhir
September 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman naskah publikasi ke Jurnal Agro Ekonomi - Penyusunan laporan akhir PPHK 	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah publikasi <i>submitted</i> - Laporan akhir PPHK

3. Bukti Kuitansi dan Pajak

KUITANSI	
Telah terima dari	: UPPM Politeknik LPP
Jenis dan Judul Penelitian	: Penelitian PHKK Politeknik LPP / Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia
Uang Sebanyak	: DUA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH
Untuk Pembayaran	: Pembelian bahan habis pakai meliputi fotocopy kuesioner, penggantian biaya telepon untuk pengisian kuesioner, biaya koordinasi penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta reward/merchandise kuesioner / Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia sesuai surat perjanjian nomor 01/SP3/UPPM/VIII/2019
Rp. 2.769.000,00	<p>Yogyakarta, 15 September 2020 Yang Membayarkan</p>  <p>Luci Paongan, SE., M.Acc</p>
Mengetahui / Menyetujui Ketua Peneliti  Luci Paongan, SE., M.Acc	<p>Ketua UPPM Politeknik LPP</p>  <p>Ugandi Utami Sarini, ST., M.Eng</p>

No. _____
Telah diterima dari: **POUTEKNIK LEP YOGYAKARTA**
Uang sebanyak **seratus ribu rupiah**
Guna membayar: **Ariston Penelitian Retani Saunt LEP**
_____ **Yk, 10 Sept 2020**
_____ **Lili PANGKABANAN in ZAHARU**
Terbilang **Rp. 100.000,-**

No. _____
Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP
Wang sebanyak: tiga ratus ribu rupiah
Untuk membayar: Asisten Pendidikan Petani Sawit LPP

27 - Desember - 2019

Terbilang: Rp 300.000

Zazilatul Rachma S.P

No. _____
Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Wang sebanyak: Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk membayar: Honor Asisten Penelitian

Yogyakarta, 24-01-20

Terbilang: Rp 300.000


(Zazilatul Rachma S.P)

No. _____
Telah diterima dari: Politeknik LPP
Wang sebanyak: tiga ratus ribu rupiah
Untuk membayar: Asisten Penelitian Petani Sawit

Yogyakarta 13/3/20

Terbilang: Rp 300.000,-

(Zazilatul Rachma S.P)

KUITANSI	
Telah terima dari	: UPPM Politeknik LPP
Jenis dan Judul Penelitian	: Penelitian PHKK Politeknik LPP / Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia
Uang Sebanyak	: SATU JUTA RUPIAH
Untuk Pembayaran	: Honorarium asisten penelitian an. Zazilatul Rochma S.P/ Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia sesuai surat perjanjian nomor 01/SP3/UPPM/VIII/2019
Rp. 1.000.000,00	<p>Yogyakarta, 15 September 2020</p> <p>Yang Membayarkan</p>  <p>Luci Paongan, SE., M.Acc</p>
Mengetahui / Menyetujui Ketua Peneliti	 <p>Bestari Helias Saputri, ST., M.Eng</p>
Luci Paongan, SE., M.Acc	 <p>Ketua UPPM Politeknik LPP</p>

TGL : 2.../12.../2019

A **Aqilla**
PHOTO COPY

JLN balapan kemakmuran Yogyakarta

Banyaknya	Nama barang	Harga	Jumlah
100	foto copy		2700

Perhatian !
Barang - barang yang sudah
dibeli tidak dapat dikembalikan

Terimakasih

Hongat, Kanti

JUMLAH 2700
UANG MUKA SISA

TGL : 2.../12.../2019

A **Aqilla**
PHOTO COPY

JLN balapan kemakmuran Yogyakarta

Banyaknya	Nama barang	Harga	Jumlah
100	foto copy		222.000

Perhatian !
Barang - barang yang sudah
dibeli tidak dapat dikembalikan

Terimakasih

Hongat, Kanti

JUMLAH 222.000
UANG MUKA SISA



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 02.264.748.1-541.000
NAMA : PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKAR
ALAMAT : JL LPP YOGYAKARTA - KOTA YOGYAKARTA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 01-01
TAHUN PAJAK : 2020
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.50.000
TERBILANG : Lima Puluh Ribu Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 02.264.748.1-541.000
NAMA PENYETOR : PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0248 6784 8845 059
MASA AKTIF : 03/02/2021 13:17:26

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

KOPKAR LPP
"VISHVA MITRA"
 Jl. Urip Sumoharjo 100
 Yogyakarta
 Telp. (0274) 586201

NOTA
CASH/BON

5/12/19
 Untuk Bp/Ibu/Sdr: _____

Bidang/Bag: _____

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH Rp.
5	Matera'	6500	32500
5	Matera'	3300	16500
2	Pen sebra	3500	7000
4	Pen stanocri	2500	10000
1	Pen balliner		15000
2	stop map	1500	3000
1	lowitadii		3000
7	Map L	2500	17500
1	Pas leancang/mop		15000
1	Hbles		10000
12	BC III	500	6000
10	BC 200	1000	10000
		TOTAL Rp.	145000

Yang Menerima: _____ Yogyakarta, 20

145 000

* TERIMA KASIH *

Harga barang kena pajak sdh termasuk PPN

GARDENA Dept. Store & Supermarket

Jl. Urip Sumoharjo 40
 YOGYAKARTA
 NFPW: 01.246.331.6.541.000

10-12-2019 110-57974
 J10 BUNGA

- 1. 31324266 ROBO CAR POLI 8 PCS BUS P 86,850
- 2. 32280013 STELAN BOLA HS 45,475
- 3. 30495340 BALON 12 IN DOF ISI 10 P 12,800
- 4. 30495419 LILIN HW 202 16,500
- 5. 30021021 AMP EV PG VISIT 17,400
- 6. 30495085 BALON FOIL ANKA 4,500
- 7. 30497019 LILIN TARUNA M K 1,200

Total 184,725
 Bayar. 2,000,000
 Jumlah Barang=8 1,815,275

Barang yang sudah dibeli
 Tidak dapat ditukar atau dikembalikan

* TERIMA KASIH *

Harga barang kena pajak sdh termasuk PPN

KUITANSI	
Telah terima dari	: UPPM Politeknik LPP
Jenis dan Judul Penelitian	: Penelitian PHKK Politeknik LPP / Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia
Uang Sebanyak	: DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH
Untuk Pembayaran	: Pembelian ATK (materai, map, alat tulis, dll), pajak dan fotocopy laporan /Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia sesuai surat perjanjian nomor 01/SP3/UPPM/VIII/2019
Rp. 282.900,00	<p>Yogyakarta, 15 September 2020 Yang Membayarkan</p>  <p>Luci Paongan, SE., M.Acc</p>
Mengetahui / Menyetujui Ketua Peneliti  Luci Paongan, SE., M.Acc	<p>Ketua UPPM Politeknik LPP</p>  <p>Luci Paongan, SE., M.Acc</p>



SPBU 44.552.16
Jl. Munggur No.42 Demangan,
Yogyakarta (0274) 548232

Sabtu, 07 Desember 2019, 21:23:17


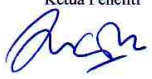

Nomor Printer: 0
Nomor Selang : 1
No. Nota : 11480
Operator : RETA
Jenis BBM : Pertalite
Liter : 13,071
Harga/liter : Rp. 7.650
Total : Rp. 100.000

PREMIUM Untuk Golongan Tidak Mampu, Gmn
akan BBM NON SUBSIDI.
Terimakasih dan selamat jalan.

PERTAMINA

Batas Liter :
Basis :
Dibayar :
Volume :
Total :
Operator : RETA

CASH

KUITANSI	
Telah terima dari	: UPPM Politeknik LPP
Jenis dan Judul Penelitian	: Penelitian PHKK Politeknik LPP / Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia
Uang Sebanyak	: DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
Untuk Pembayaran	: Biaya transportasi (kendaraan dan bensin) untuk pembelian perlengkapan/bahan habis pakai dan mentoring penelitian / Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia sesuai surat perjanjian nomor 01/SP3/UPPM/VIII/2019
Rp. 250.000,00	Yogyakarta, 15 September 2020 Yang Membayarkan 
Mengetahui / Menyetujui Ketua Peneliti  Luci Paonganan, SE., M.Acc	 Ketua UPPM Politeknik LPP Lestari Sapti, ST., M.Eng

Toko Merah Gejayan
Jl Gejayan Nomor 1 Mrican

No: 29020121107
Tanggal: 02/01/21
Kasir: Partini

Uraian
12:12
Kartu

Name	Qty	Harga	Disc	Total
HVS SD A4/70GSM				
1 RIM		39.200		39.200
BK GK HC F/100				
1 PCS		15.400		15.400
BK KIKY HC Q/200				
2 PCS		21.000		42.000
BK KIKY HC Q/100				
2 PCS		11.300		22.600
POST IT PRONTO MINI BRILLIANT CURECS/50X5				
1 PCS		20.500		20.500
POST IT PRONTO 655 75X125/YLM				
2 PCS		11.500		23.000
TAPE NACHI MASK 1				
2 Roll		4.000		8.000
PP CLIP VTEC VINYL VT-001				
2 PCS		3.000		6.000
B CLIP VTEC 200				
2 DOZIN		10.200		20.400
B CLIP MONTANA NO.111				
4 DOZIN		5.000		20.000
B CLIP V-TRO 155				
3 DOZIN		7.500		22.500
B CLIP MONTANA BC 260				
1 DOZIN		18.000		18.000
TIME TABLE BESAR				
1 PCS		18.900		18.900
TS SL/PPL 58X10				
6 PACK10		20.900		125.400
BATT ABC BIRU R6/K				
7 PACK(4)		53.500		374.500
DESK ORGANIZER VTEC VT-9077				
1 SET		82.000		82.000
CASHBOX KENKO CB-890XL				
1 PCS		150.000		150.000

Total 999.400
Charge 0
Grand Total 999.400

Terima Kasih atas kunjungan anda
Barang yang sudah dibeli
tidak dapat dikembalikan
Harga sudah termasuk pajak

Toko MERAH
GEJAYAN YOGYAKARTA
027 131 192 WA 08562705848

KUITANSI	
Telah terima dari	: UPPM Politeknik LPP
Jenis dan Judul Penelitian	: Penelitian PHKK Politeknik LPP / Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia
Uang Sebanyak	: SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
Untuk Pembayaran	: Pengadaan Peralatan Penunjang (Kertas Kasir, Cash box, baterai kalkulator lab, dll) /Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia sesuai surat perjanjian nomor 01/SP3/UPPM/VIII/2019
Rp. 999.400	<p>Yogyakarta, 15 September 2020</p> <p>Yang Membayarkan</p>  <p>Luci Paongan, SE., M.Acc</p>
Mengetahui / Menyetujui Ketua Peneliti	 <p>Ketua UPPM Politeknik LPP</p> <p>Netalesi Saputri, ST., M.Eng</p>
 Luci Paongan, SE., M.Acc	

No. _____
Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Uang sebanyak: Seratus Ribu Rupiah
Untuk membayar: Reward Pengisian kuponer "Tantangan dan
keberhasilan Petani Rakyat kelapa Sawit (Swadaya) di Indonesia"
13 Januari 2020
TIKA AFISAH
(18.01.031)
Terbilang: Rp 100.000

No. _____
Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Uang sebanyak: Seratus Ribu Rupiah
Untuk membayar: Reward Pengisian kuponer "Tantangan dan
keberhasilan Petani Rakyat kelapa Sawit (Swadaya) di Indonesia"
13 Januari 2020
Putri wahyuni
(18.01.051)
Terbilang: Rp 100.000

No. _____
Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Yang sebanyak: Seratus Ribu Rupiah
Untuk membayar: Reward Pengisian kuitipan "Tantangan dan Kesejahteraan Petani Rakyat Kelapa Sawit (Suadaya) Di Indonesia"
10 Januari 2020
Verli Arlita (1903051)
Terbilang: Rp 100.000

No. _____
Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Yang sebanyak: Seratus Ribu Rupiah
Untuk membayar: Reward Pengisian kuitipan "Tantangan dan Kesejahteraan Petani Rakyat Kelapa Sawit (Suadaya) di Indonesia"
10 Jan 2020
M. HALIM YAHYA
07.03.044
Terbilang: Rp 100.000

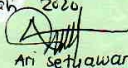
No. _____
Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Yang sebanyak: Seratus Ribu Rupiah
Untuk membayar: Reward Pengisian kuitipan "Tantangan dan Kesejahteraan Petani Rakyat Kelapa Sawit (Suadaya) di Indonesia"
10 Januari 2020
DIAN NUR ANISA
17.04.062
Terbilang: Rp 100.000

(Pitala)

No. _____
Telah diterima dari: Politeknik LPP YOGYAKARTA
Uang sebanyak Seratus Ribu Rupiah
Untuk membayar: pengujian kuesioner & koordinasi pengumpulan kuesioner TKM ISL Tk.3
_____ 13-01-2020
Totalnya Rp. 100.000,-

Ropitah (17-01-013)

(Ary)

No. _____
Telah diterima dari: Politeknik LPP Yogyakarta
Uang sebanyak dua ratus ribu rupiah
Untuk membayar: - pre-survey 2x
- pengujian kuesioner
- koordinasi pengumpulan kuesioner
_____ 2 Februari 2020
Totalnya Rp. 200.000,-

Ari Setiawan
17-03-024

No. _____
 Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP
 Uang sebanyak Seratus Ribu Rupiah
 Untuk membayar: Koordinasi pembagian kuesioner
 Terbilang Rp 100.000,00
 13/1/2020
 Sabkijoso Syll

(Hans)

No. _____
 Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
 Uang sebanyak Seratus Ribu Rupiah
 Untuk membayar: pengisian kuesioner & koordinasi pengumpulan kuesioner TKM ISLU TK.2 & 1
 13 Januari 20
 Handoko
 17.01.044
 Terbilang Rp 100.000,-

(Kamal)

No. _____
 Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
 Uang sebanyak Lima Puluh Ribu Rupiah
 Untuk membayar: koordinasi pengumpulan kuesioner AKT TK.II
 13-01-2020
 Kamal Aji
 18.03.050
 Terbilang Rp 50.000,-

No. _____
 Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP
 Uang sebanyak: lima puluh ribu rupiah
 Untuk membayar: koordinasi kuesioner kelas BTP D3 BLU
 TK. 1 an. Fajar

 _____ 26 Desember 2019

 Totalang: Rp 50.000,-
 Fajar Alamsyah 1904104

(Beben)

No. _____
 Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP
 Uang sebanyak: lima puluh ribu rupiah
 Untuk membayar: koordinasi pengumpulan kuesioner prodi
 Akuntansi BLU TK. 1

 _____ 9 Januari 2020

 Totalang: Rp 50.000,-
 B2.
 Beri Hariadi (1703066)

(Dian)

No. _____
 Telah diterima dari: POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
 Uang sebanyak: Lima puluh Ribu Rupiah
 Untuk membayar: koordinasi pengumpulan kuesioner BTP DII
 Tingkat II

 _____ 10 Januari 2020

 Totalang: Rp 50.000,-
 Dian MIRA AMISA
 17.04.062

**BUKTI PENYERAHAN PENGGANTIAN BIAYA KOMUNIKASI
PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
TANTANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL SWADAYA KELAPA SAWIT DI INDONESIA
PRODI AKT SEMESTER 3 (BPDP KS)
DESEMBER 2019**

16 orang

PS : kamal

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	TANDA TANGAN
1	Juanita Rohimah Pulungan ✓ 23/12	1803026	1 <i>[Signature]</i>
2	Shinta Amelia Azhary	1803027	2
3	Sonia Zahara Damanik ✓ 23/12	1803028	3 <i>[Signature]</i>
4	Rohmiati Solehah	1803029	4 <i>[Signature]</i>
5	Yuliana Elensia	1803030	5
6	Antonia Kalumba ✓ 23/12	1803031	6 <i>[Signature]</i>
7	Iksan	1803032	7
8	Anjelima Ria Marito ✓ 23/12	1803033	8 <i>[Signature]</i>
9	Rafika Anjani	1803034	9
10	Zaenal Abidin	1803035	10
11	Pratiwi Kasih ✓ 23/12	1803036	11 <i>[Signature]</i>
12	Nurhasanah	1803037	12
13	Lamria Astri Novita Simanjuntak	1803038	13
14	Olgie Ajie Septian	1803039	14
15	Dini Amalya Reski ✓ 23/12	1803040	15 <i>[Signature]</i>
16	Ira Agustin	1803041	16
17	Jonatan Humiras Kristonius Pakpahar	1803042	17 <i>[Signature]</i>
18	Johan Syahalim	1803043	18
19	Nabila Qumairoh Hasibuan 27/12 ✓	1803044	19 <i>[Signature]</i>
20	Khairun Nisa	1803045	20
21	Rahmat Budi Rizki ✓ 20/12	1803046	21 <i>[Signature]</i>
22	Zahwa Maysura	1803047	22 <i>[Signature]</i>
23	Putri Imelda ✓ 23/12	1803048	23 <i>[Signature]</i>
24	Nela Nurhasana	1803049	24
25	Kamal Aji ✓ 20/12	1803050	25 <i>[Signature]</i>
26	Radika ✓ 23/12	1803051	26 <i>[Signature]</i>
27	Khairul Sapar Sidik	1803052	27
28	Putri Indah Riana	1803053	28
29	Eduardo Edo	1803054	29 <i>[Signature]</i>
30	Imam Akbar Ramadhani	1803055	30 <i>[Signature]</i>


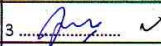







7 orang

BUKTI PENYERAHAN PENGGANTIAN BIAYA KOMUNIKASI
 PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
 TANTANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL SWADAYA KELAPA SAWIT INDONESIA
 PRODI TKM SEMESTER 1 (BPDP KS)
 DESEMBER 2019

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	OKSA CAKTI ANANDA ✓ 23/12	1901050	1
2	M. NURHIDAYAH	1901051	2
3	INDRA MAWANTO ✓ 25/12	1901052	3
4	TRIA KHARISMA PUTRI ✓ 23/12	1901053	4
5	YULI ARYAN PUTRI	1901054	5
6	AJI PRASETYO ✓ 23/12	1901055	6
7	JERI ALEX CAHYONO ✓ 23/12	1901056	7
8	HERMAN SYAH	1901057	8
9	GABRIEL PARLINDUNGAN MANURUNG	1901058	9
10	MUHAMMAD HAFIZ ✓ 23/12	1901059	10
11	M. RISKY AJISYAH PANGARIBUAN	1901060	11
12	YEZA APRIANTI	1901061	12
13	JONI PRAYOGA	1901062	13
14	M.FADLI	1901063	14
15	LELI LUSIANNA MAGARETTA BR SINULINGGA	1901064	15
16	URWATUL WUSQA	1901065	16
17	MUHAMMAD REZA	1901066	17
18	PIRNANTI SIHOTANG	1901067	18
19	MUHAMAD ALDI PRATAMA	1901068	19
20	UMI AISYAH HARAHAP	1901069	20
21	TIARA BASRI	1901070	21
22	AMIL AMRILLAH	1901071	22
23	M. RIZKI ABID PRATAMA	1901072	23
24	RANA PUTRI PASOLON	1901073	24
25	ADANG RUSENDI ✓ 23/12	1901074	25
26	ALVIYER SARAGIH	1901075	26
27	JENIUS HALAWA	1901076	27
28	AHMAD SHIDIQ AL BAROKAH	1901077	28
29	DANANG	1901078	29
30	MARDION SURYA	1901079	30

**BUKTI PENYERAHAN PENGANTIAN BIAYA KOMUNIKASI
PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
TANTANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL SWADAYA KELAPA SAWIT DI INDONESIA
PRODI BTP SEMESTER 5 (BPDP KS)
DESEMBER 2019**

9 orang

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	TANDA TANGAN
1	Agung Abdinoto 28/12	170503097	1 
2	Ahmad Isriadi	170801018	2
3	Aldi Rossaldi 27/12	170903027	3  ✓
4	Andre Andika	170403037	4
5	Arianto Sianpar 20/12	1705030111	5 
6	Bambang Irawan	170302042	6
7	Dian Nur Anisa 20/12	1705030126	7 
8	Fathur Rahman Sidiq Sinaga	170103134	8
9	Harkansyah	1705030136	9
10	Hendry Yosafat Aritonang	170302053	10
11	Irsal Masyudi	170103143	11
12	Khairun Nisyah	170103150	12
13	Lgina Exsaudina Br. Sirait	170103151	13
14	M. Arif Hidayatulloh	170703057	14
15	Muhammad Aminuddin	170103156	15
16	Muhammad Azan Mehaga Tarigan	170503164	16
17	Muhammad Hendri	170503166	17
18	Muhammad Riza Fauzi	170801029	18
19	Muhammad Sapril Sitepu 27/12	170103164	19  ✓
20	Nuklis Prianda Barus	170103166	20
21	Puguh Sugiarto	170503178	21
22	Putra Simanjuntak	170103171	22
23	Rava Suranta Tarigan	170503181	23
24	Rio Gunanta Barus 20/12	170103180	24 
25	Siska Prandari	170103187	25
26	Slamet Rohmanto 26/12	170703070	26 
27	Suhardi	171003108	27 
28	Tedi Barnabas 20/12	170703073	28 
29	Widya Angela Br. Ginting	170103197	29
30	Yefta Philorea Theda	171003118	30

15 orang

BUKTI PENYERAHAN PENGGANTIAN BIAYA KOMUNIKASI
 PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
 TANTANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL SWADAYA KELAPA SAWIT INDONESIA
 PRODI AKT SEMESTER 1 (BPD KS
 DESEMBER 2019

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	ZESICA MOUNIQ PURBA ✓ 23/12	1903042	1.
2	ANGGI PRADILA PURBA	1903043	2
3	KIKI BUDI SUTRISNO	1903044	3
4	SULISTIA WAHYUNINGSIH ✓ 23/12	1903045	4
5	MAYLAN ROLIKA RAJA GUK GUK	1903046	5
6	BENI JULIAN	1903047	6
7	LAILA ANI SAFITRI	1903048	7
8	MUHAMMAD DIDIK WAHYU KURNIAWAN ✓ 23/12	1903049	8
9	SUKMA RAHMADANI	1903050	9
10	VERLI ARLITA ✓ 23/12	1903051	10
11	DANUR WINDO	1903052	11
12	APRI SUPRIYANTO	1903053	12
13	RITA S ✓ 23/12	1903054	13
14	QATRUN NADA NADIFAH ✓ 23/12	1903055	14
15	TRI MALINDA ✓ 23/12	1903056	15
16	MUKHLIS	1903057	16
17	MERRY TRI WIJAYANTI	1903058	17
18	MUHAMMAD NOOR ARIFIN	1903059	18
19	TEUKU BANTA LIDAN	1903060	19
20	RULLY SWENRIN VALENTINKA PASARIBU ✓ 23/12	1903061	20
21	NUR AZLIN NADIA ✓ 23/12	1903062	21
22	OKTAVIANI ✓ 23/12	1903063	22
23	MAHFUZH AZIZI ✓ 23/12	1903064	23
24	ANGGI PRANATA ✓ 23/12	1903065	24
25	SUSANTI ✓ 23/12	1903066	25
26	MEGA SILVIA SITORUS ✓ 23/12	1903067	26
27	JAMILATUL ROHMAH	1903068	27
28	BENI HARIADI ✓ 23/12	1903069	28
29	INTAN SETIA RATNASARI	1903070	29
30	AMELIA CHRIST NESIA	1903071	30

BUKTI PENYERAHAN PENGGANTIAN BIAYA KOMUNIKASI
PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
TANTANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL SWADAYA KELAPA SAWIT DI INDONESIA
PRODI TKM SEMESTER 5 (BPDP KS)
DESEMBER 2019

12 orang

Pj: Ropitah

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	TANDA TANGAN
1	Abdul Rahman Lubis	170103096	1
2	Ajuandi Sirait 26/12	170502051	2 <i>P. Sirait</i>
3	Aldi Priono	170402023	3
4	Amir Waliudin	171002040	4
5	Awaldes Kristian Panjaitan 23/12	170103112	5 <i>P. Awaldes</i>
6	Bari Zulkifli	171002043	6
7	Bayu Ardani	170702033	7 <i>P. Bayu</i>
8	Dendi Arisandi	170801012	8
9	Edo Saputra	170102062	9
10	Handoko	170502065	10
11	Haqi Habibie	170492026	11
12	Hasbi Ananta	170402027	12
13	Indra Saputra 26/12	170103142	13 <i>P. Indra</i>
14	Lailil Wahyu Vadila	170902022	14
15	M. Putra Adrinosa	170502068	15
16	Meli Andri Siregar 23/12	170102077	16 <i>P. Meli</i>
17	Muhammad Rizki	170503167	17
18	Novia Yulianti 23/12	170502071	18 <i>P. Novia</i>
19	Nugi Firmansyah 26/12	170503173	19 <i>P. Nugi</i>
20	Ropitah Sinaga	170102091	20 <i>P. Ropitah</i>
21	Rahul Sanjaya	170702037	21
22	Riko Prasetyo	170103178	22
23	Riska Wahyuni 23/12	170502077	23 <i>P. Riska</i>
24	Rulianto	170502079	24
25	Said Syarif Hidayatullah 23/12	170502081	25 <i>P. Said</i>
26	Silvia Restiana	170502082	26
27	Tri Joko Susilo 23/12	170502086	27 <i>P. Tri</i>
28	Uca Indra Safi Akmal	171002062	28
29	Wiwi Surya Wardhaning 23/12	170102095	29 <i>P. Wiwi</i>
30	Yeti Fitria Dewi	170502088	30

BUKTI PENYERAHAN PENGANTIAN BIAYA KOMUNIKASI
PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
TANTANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL SWADAYA KELAPA SAWIT DI INDONESIA
PRODI TKM SEMESTER 3 (BPDP KS)
DESEMBER 2019

15 orang

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	TANDA TANGAN
1	Tika Afisah ✓ 25/12	1801031	1
2	Adi Sandoko ✓ 25/12	1801032	2
3	Arie Rahnanda ✓ 25/12	1801033	3
4	Diky Dinaldi ✓ 25/12	1801034	4
5	Imam Maulana	1801035	5
6	Supri Andina Sahputra ✓ 25/12	1801036	6
7	Citra Cici Handayani	1801037	7
8	Mukhsinatun Fauziah	1801038	8
9	Oloan Deni Saputra Sitorus 25/12 ✓	1801039	9
10	Ahmad Fauzi	1801040	10
11	Julidas Siringo Ringo	1801041	11
12	Khairul	1801042	12
13	Aida Fitri	1801043	13
14	Triyono	1801044	14
15	Adjie Ramadhana	1801045	15
16	Siti Khairani Br Ginting	1801046	16
17	Aldo Wardana Saputra	1801047	17
18	Boy Cahyadi Pangaribuan ✓ 25/12	1801048	18
19	Helmi Hendarwan Nainggolan	1801049	19
20	Rikky Leonardo Pasifikus Sinaga ✓ 25/12	1801050	20
21	Putri Wahyuni ✓ 25/12	1801051	21
22	Pangihutan Damanik	1801052	22
23	Cicatur Nauli Saragi	1801053	23
24	Muhammad Riduan	1801054	24
25	Juni Putra Nazara	1801055	25
26	Anang Ma'ruf ✓ 25/12	1801056	26
27	Willy Parasian Tambunan ✓ 25/12	1801057	27
28	Dika Aji Winata ✓ 25/12	1801058	28
29	Sulaiman Manik	1801059	29
30	Samuel Hardianto Harefa ✓ 25/12	1801060	30

**BUKTI PENYERAHAN PENGGANTIAN BIAYA KOMUNIKASI
PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
TANTANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL SWADAYA KELAPA SAWIT DI INDONESIA
PRODI AKT SEMESTER 5 (BPDP KS)
DESEMBER 2019**

27 orang

RJ : Ary Setyawan

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	TANDA TANGAN
1	Ade Dwi Pebriyandi ✓ 23/12	170701002	1. <i>AS</i>
2	Anggi Kurniawan 27/12	171001003	2. <i>Anggi</i>
3	Ari Setyawan ✓ 23/12	171001006	3. <i>Ari Setyawan</i> ✓
4	Aris Sutanto ✓ 23/12	170401003	4. <i>AS</i>
5	Bima Meigantara	171001008	5.
6	Bram Abimanyu P ✓ 23/12	170101004	6. <i>Bram</i>
7	Candra Bayu Putra	170201002	7. <i>Candra</i>
8	Deby Widyaningsih 02/01 20 ✓	170801021	8. <i>Deby</i>
9	Desy Indriani 02/01 20 ✓	170101008	9. <i>Desy</i>
10	Diky Wahyudi 02/01 20 ✓	170101009	10. <i>Diky</i>
11	Eksi Nur Agustina ✓ 23/12	170801003	11. <i>Eksi</i>
12	Elysabet Harianja 02/01 20 ✓	170301001	12. <i>Elysabet</i>
13	Erma Septianingsih ✓ 23/12	170101013	13. <i>Erma</i>
14	Fitria Erawati ✓ 23/12	170103135	14. <i>Fitria</i>
15	Hendrikus Hendri ✓ 23/12	170701012	15. <i>Hendrikus</i>
16	Husaini Muhammad Harahap ✓ 23/12	170501017	16. <i>Husaini</i>
17	Khoirunnisa Az Zahra ✓ 23/12	170603009	17. <i>Khoirunnisa</i>
18	Muhammad Ali ✓ 23/12	170501025	18. <i>Muhammad Ali</i>
19	Muhammad Halim Yahya ✓ 23/12	170101034	19. <i>Muhammad Halim</i>
20	Muhammad Ridwan	170501026	20.
21	Muhammad Taufiq Amin ✓ 23/12	170801006	21. <i>Muhammad Taufiq</i>
22	Mulyono Herlambang ✓ 23/12	170201009	22. <i>Mulyono</i>
23	Nahdia Rizki Hasibuan ✓ 23/12	170101036	23. <i>Nahdia Rizki</i>
24	Nuri Alivia	170501032	24.
25	Rama Ahmad Fauzi ✓ 23/12	171001020	25. <i>Rama Ahmad</i>
26	Ria Natalia ✓ 23/12	170501037	26. <i>Ria Natalia</i>
27	Roni Baginda Encara Lubis ✓ 23/12	170501038	27. <i>Roni Baginda</i>
28	Suwito ✓ 27/12	170501044	28. <i>Suwito</i>
29	Tri Siska Febriana X 27/12 (Baru)	170701029	29. <i>Tri Siska</i>
30	Try Rizky Mawaddah ✓ 23/12	170101053	30. <i>Try Rizky</i>

30 orang

BUKTI PENYERAHAN PENGANTIAN BIAYA KOMUNIKASI
PENELITIAN DOSEN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
TANTANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL SWADAYA KELAPA SAWIT INDONESIA
PRODI BTP SEMESTER 1 (BDDP KS) RS: Fajar Alamsyah
DESEMBER 2019

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	ALDI KURNIAWAN 26/12	1904099	1
2	NATANAEL NAINGGOLAN 26/12	1904100	2
3	FERDY PRASTYO 26/12	1904101	3
4	OKTA FEBRIADI 26/12	1904102	4
5	SIGIT RUSWANDI 26/12	1904103	5
6	FAJAR ALAMSYAH X 26/12 (buruk)	1904104	6
7	WILLY PERDANA AGUSTIN 26/12	1904105	7
8	JEFRI FRANTONI 26/12	1904106	8
9	ARYA RINALDI 26/12	1904107	9
10	ZAKARIA PRATAMA 26/12	1904108	10
11	RAGIL SAEFULLOH 26/12	1904109	11
12	FEBRIANTO 26/12	1904110	12
13	JOFFE CHALEB JEDIDIAH PANJAITAN 26/12	1904111	13
14	DEVI DIAN SAPUTRA 26/12	1904112	14
15	FRANCISKUS MARSELINUS LUMBAN GAOL 26/12	1904113	15
16	DIMAS ADITYA RAMADAN 26/12	1904114	16
17	ANDIKA JAYA KELANA MANURUNG 26/12	1904115	17
18	EKO SAPUTRO 26/12	1904116	18
19	BAGAS RIANTO 26/12	1904117	19
20	TOMI HAMALI 26/12	1904118	20
21	M.RERE SYAHREZEINDA 26/12	1904119	21
22	OGY EVANDA PERANGIN-ANGIN 26/12	1904120	22
23	MEIKEL OWEN 26/12	1904121	23
24	M.KOES HERMAWAN 26/12	1904122	24
25	DERI HIDAYAT 26/12	1904123	25
26	IQBAL SYAHWALLAZI 26/12	1904124	26
27	PATAR NANDO SAGALA 26/12	1904125	27
28	MAULANA IRSAN 26/12	1904126	28
29	PERI TAUFIQ 26/12	1904127	29
30	PITRA NIRWANTO 26/12	1904128	30

No. _____

Telah diterima dari: **POLITEKNIK LPP YOSTALAKERTA**


Uang sebanyak **Satu juta tiga ratus sepuluh rupiah**

Suna membayar: **penggantian biaya telepon kelesianer**

131 orang @ Rp. 1000,- . Nama-nama terlampir.

YK **26** Des **2019**

Terbilang **Rp. 1.310.000,-**



233111338

PT POS INDONESIA (PERSIAD)
Kantor YOGYAKARTA GONDOWANAN 55122A

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPh Billing)

Tanggal : 05-01-2021 15:20:27
No.Resi : 55122A-10/2021/800090 Petugas : 550002811

Tanggal Buku : 06-01-2021 NTP : 987865233757
Kode Cabang Pos : 055000 NIFN : 369100062754C103
 STAN : 233757

Kode Billing : 024867848845059
NPM : 022647481541000
Nama : PENDIDIKAN PERKEBUNGAN YOGYAKARTA
Alamat : JL LFP YOGYAKARTA - KOTA YOGYAKARTA
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 01012020
No SK : 0000000000000000
MOP :
Jumlah Setoran : Rp. 50.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima puluh ribu rupiah) **KANTOR POS** 

Syarat dan ketentuan berlaku. Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

4. Bukti Luaran

[JAE] Submission Acknowledgement

Ir. Sunarsih, M.Si. <iaard.ejournal@gmail.com>
Kepada: Mrs Luci Paonganan <lcp@poltekipp.ac.id>

8 September 2020 13.49

Mrs Luci Paonganan:

Thank you for submitting the manuscript, "TANTANGAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN PETANI KECIL SWADAYA SAWIT DI INDONESIA" to Jurnal Agro Ekonomi. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

<http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae/author/submission/12076>

Username: lucipaonganan

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Ir. Sunarsih, M.Si.
Jurnal Agro Ekonomi

Jurnal Agro Ekonomi



JURNAL AGRO EKONOMI (JAE)

Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Jl. Tentara pelajar No. 3B Bogor 16111

E-mail: jae.psekp@gmail.com

Tlp. 0251-8333964

URL: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae>

faks. 0251-8314496

FORMULIR PENGALIHAN HAK CIPTA (Copyright Transfer Agreement)

Kepada Yth.

Dewan Redaksi Jurnal Agro Ekonomi

Naskah yang berjudul : Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia

Nama Penulis Utama : Luci Paongan

No. HP : 0831 - 2697 - 9865

Alamat E-mail : lcp@polteklpp.ac.id

Penulis Pendamping :

Nama	Nomor HP	Alamat E-mail
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Kami menyatakan bahwa naskah ilmiah ini adalah asli dan penulis mengalihkan hak ciptanya kepada Jurnal Agro Ekonomi, sekiranya dan jika karya tulis ilmiah ini diterima.

Setiap nama yang tercantum sebagai penulis dalam karya tulis ilmiah ini telah berkontribusi dalam hal substansi dan intelektualitas dan harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran hak cipta, maka hal itu merupakan tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab Jurnal Agro Ekonomi.

Isi karya tulis ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan dalam jurnal lain.

Bogor, 4 September 2020

Disetujui oleh Penulis Utama



Luci Paongan, SE., M.Acc



JURNAL AGRO EKONOMI (JAE)

Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Jl. Tentara pelajar No. 3B Bogor 16111

E-mail: jae.psekp@gmail.com

Tlp. 0251-8333964

URL: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae>

faks. 0251-8314496

FORMULIR PERNYATAAN ETIKA (Ethical Statement Agreement)

Kepada Ytth.

Dewan Redaksi Jurnal Agro Ekonomi

Naskah yang berjudul : Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia

Nama penulis : Luci Paongan

Kami menyatakan bahwa:

- a) Artikel kami yang telah diserahkan ke Jurnal Agro Ekonomi untuk dinilai adalah asli atau bebas dari fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, duplikasi, fragmentasi/salami dan pelanggaran hak cipta data/isi.
- b) Artikel ini belum pernah diterbitkan di tempat lain atau tidak sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan oleh jurnal lain, dan selama proses penilaian oleh jurnal ini tidak akan ditarik dan dikirimkan ke jurnal lain untuk dinilai.
- c) Penulis bersedia memperbaiki naskah yang telah dinilai dan tidak menariknya secara sepihak tanpa memberitahu redaksi, terutama jika naskah sedang dalam proses telaah.
- d) Artikel kami tidak mengandung pernyataan yang melanggar hukum, memfitnah atau lainnya dan tidak mengandung bahan yang melanggar hak-hak pribadi atau hak milik dari setiap orang atau badan lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab.

Bogor, 4 September 2020

Pemohon,



Luci Paongan

TANTANGAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN PETANI KECIL SWADAYA SAWIT DI INDONESIA

Luci Paongan

*Politeknik LPP Yogyakarta
Jl. LPP No. 1A Balapan, Yogyakarta 55222, Indonesia
E-mail: lcp@polteklpp.ac.id*

ABSTRACT

The existence of oil palm independent smallholders in Indonesia has not been officially recorded, is in a vulnerable position and has not been touched by government policies. This has implications for the emergence of economic and institutional challenges faced by oil palm independent smallholders in managing their plots. This study aims to determine the main economic challenges faced by oil palm independent smallholders as well as institutional challenges and solutions expected by them. This research is an exploratory research with survey method and analyzed by descriptive statistics. Primary data collection was carried out by using a questionnaire method with telephone communication in December 2019. Research respondents consisted of 109 oil palm independent smallholders in 14 provinces in Indonesia. The aspects surveyed included a general description of the smallholders, aspects of economic challenges, institutional aspects and the solutions expected by farmers. The results showed that the main economic challenge faced by independent smallholders of oil palm is the fluctuating and low selling price of FFB. Most of the farmers do not join farmer organizations because of the unavailability of farmer organizations. The institutional model preference is a farmer-managed cooperative. Solutions expected by farmers include protection of the FFB sale price, availability of farmer institutions, access to palm oil mills, infrastructure improvements and training on good agricultural practices.

Keywords: oil palm independent smallholders, oil palm, economic challenges, smallholders institutions

ABSTRAK

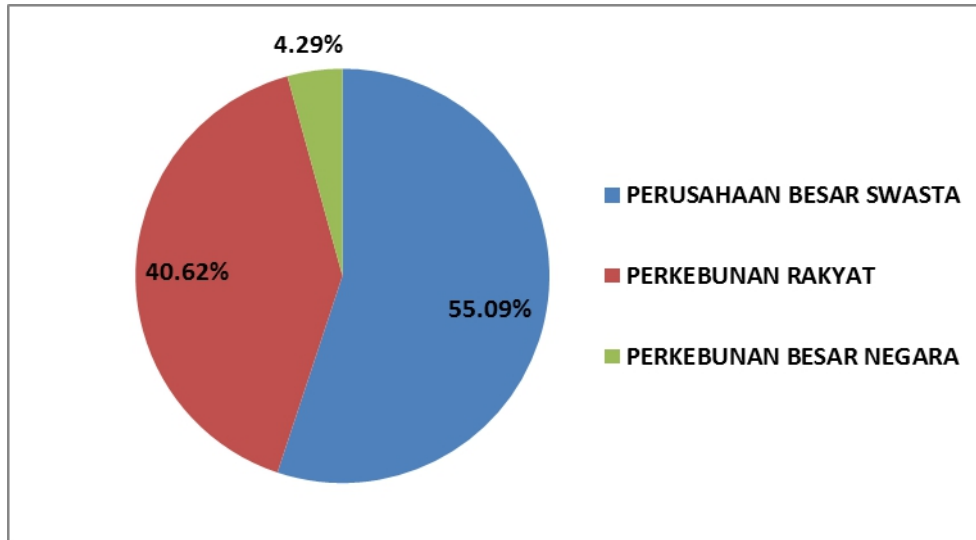
Keberadaan petani kecil swadaya sawit di Indonesia belum terdata secara resmi, berada dalam posisi yang rentan dan belum banyak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada munculnya tantangan ekonomi dan kelembagaan yang dihadapi oleh para petani kecil swadaya sawit dalam mengelola lahan sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit, tantangan kelembagaan dan solusi yang diharapkan oleh petani kecil swadaya sawit. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode survey dan dianalisa secara statistic deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode angket dengan komunikasi telepon pada Desember 2019. Responden penelitian terdiri dari 109 petani kecil swadaya sawit di 14 provinsi di Indonesia. Aspek yang disurvei meliputi deskripsi umum petani kecil swadaya sawit, aspek tantangan ekonomi, aspek kelembagaan petani dan solusi yang diharapkan petani. Hasil penelitian menunjukkan tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit adalah harga jual TBS berfluktuasi dan rendah. Sebagian besar petani tidak bergabung dalam organisasi petani karena ketidakterediaan organisasi petani. Model kelembagaan yang diinginkan petani adalah koperasi yang dikelola oleh petani. Solusi yang diharapkan petani meliputi perlindungan harga jual TBS, tersedianya kelembagaan petani, akses ke pabrik kelapa sawit, perbaikan infrastruktur dan penyuluhan tentang praktek budidaya yang baik.

Kata kunci: petani kecil swadaya sawit, kelapa sawit, tantangan ekonomi, kelembagaan petani

PENDAHULUAN

Tiga aktor utama dalam industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah perusahaan perkebunan sawit milik swasta (Perusahaan Besar Swasta), petani

(Perkebunan Rakyat) dan perusahaan perkebunan milik pemerintah (perkebunan besar negara). Masing-masing pihak tersebut memiliki persentase luas pengusahaan lahan sawit pada tahun 2018 sebagai berikut:



Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2019)

Gambar 1. Luas Areal Lahan Kelapa Sawit Menurut Status Pengusahaan, 2018

Berdasarkan Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit 2018 – 2020 (Direktorat Jenderal Perkebunan 2019), total luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 adalah 14.326.350 hektar. Dari total areal tersebut luas areal perkebunan dikelola perusahaan swasta adalah seluas 7.892.706 (55,06%), luas areal dikelola petani seluas 5.818.888 hektar (40,62%) dan luas areal yang dikelola perusahaan milik pemerintah seluas 614.756 hektar (4,29%). Ditinjau dari total luas areal yang dimiliki dan dikelola petani maka petani berada di urutan kedua dengan selisih 14,47% lebih sempit dibandingkan dengan luas lahan dikelola perkebunan swasta dan selisih 36,33% lebih luas dibandingkan dengan luas areal kelola perkebunan pemerintah. Hal ini menunjukkan peran petani rakyat sebagai kelompok produsen sawit di Indonesia cukup signifikan. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (2019), Perkebunan Rakyat merupakan perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumahtangga perkebunan rakyat yang tidak berbadan hukum.

Petani kelapa sawit mengelola input produksi berupa bibit kelapa sawit dan pupuk untuk menghasilkan buah kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS) untuk dijual sebagai sumber penghasilan. Terdapat dua kelompok utama petani kelapa sawit di Indonesia yakni petani plasma dan petani swadaya. Petani plasma merupakan petani yang memiliki perkebunan sawit yang didirikan oleh perusahaan swasta atau pemerintah dan menggunakan dukungan finansial dari pihak eksternal (Hidayat 2017). Menurut Hutabarat (2017), pekebun plasma adalah pekebun rakyat yang bekerjasama atau memiliki kontrak usaha dengan perusahaan atau pabrik kelapa sawit. Sementara itu, petani swadaya adalah pekebun rakyat yang segala aktifitas perkebunannya dilakukan secara mandiri (*self-organized, self-managed, self-financed*) dan tidak terikat kontrak dengan perusahaan kelapa sawit (Hidayat 2017).

Daemeter (2015) membagi petani swadaya sawit dalam 5 kategori berdasarkan model transaksinya sebagai berikut:

- a. *Small-scale independent farmers* yakni petani kecil swadaya sawit umumnya memiliki lahan seluas 2-5 ha dan terhubung ke rantai pasokan/pabrik kelapa sawit melalui agen lokal (con: pengepul/tengkulak) serta tidak memiliki kontrak formal dengan perusahaan.
- b. *Large-scale independent farmer* yakni petani besar swadaya sawit cenderung merupakan golongan menengah keatas dengan kepemilikan lahan > 10 hingga ratusan hektar, terhubung ke rantai pasokan/pabrik kelapa sawit melalui pedagang lokal atau terhubung langsung dengan pabrik kelapa sawit. Kelompok petani ini merupakan kelompok yang mendapatkan perhatian khusus karena terindikasi menyebabkan kerusakan dan kebakaran hutan dalam usaha kebun sawit mereka.
- c. *Farmer groups or farmer-managed cooperatives* yakni sekelompok petani yang bergabung dalam organisasi seperti koperasi yang dikelola oleh petani untuk dapat terhubung langsung dengan pabrik kelapa sawit dalam menjual TBS mereka.
- d. *Smallholder farmer managed plots* yakni petani yang terhubung melalui skema plasma atau petani plasma dan terhubung langsung dengan pabrik kelapa sawit. Petani umumnya berlokasi di dekat perkebunan perusahaan, memiliki kontrak formal dengan perusahaan, mendapatkan pinjaman dari perusahaan untuk mengembangkan kebun sawit. Perusahaan biasanya menyediakan pupuk, memberikan pelatihan, dan bantuan lainnya dengan mewajibkan petani untuk menjual TBS kepada perusahaan.
- e. *Company-managed smallholder-owned plantations* yakni lahan petani disewakan dan dikelola oleh perusahaan perkebunan atas nama petani sehingga petani dalam hal ini merupakan pemegang saham yang akan mendapatkan pengembalian/dividen dari lahan mereka yang dikelola perusahaan, penjualan TBS terhubung langsung dengan pabrik kelapa sawit.

Idsert dan Schoneveld (2016) dalam penelitiannya di Provinsi Riau berjudul Mewujudkan Petani Kecil Sawit Mandiri Yang Lebih Produktif dan Berkelanjutan di Indonesia (Pandangan dari tipologi petani kecil) membagi petani sawit dalam 3 kelompok utama berdasarkan ukuran kepemilikan lahan yakni:

- a. Petani kecil yakni dengan kepemilikan lahan 0-3 hektar
- b. Petani menengah dengan kepemilikan lahan 3,1 – 15 hektar
- c. Petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari 15 hektar

Tiga kelompok ini kemudian diklasifikasikan dalam 6 tipologi petani yakni petani kecil migran (37%) terdiri dari petani migran dari etnis Jawa dan Batak dengan rata-rata luas lahan sebesar 2,1 hektar; petani kecil asli (29%) yakni kelompok petani beretnis Melayu dengan ukuran lahan sekitar 1,8 hektar; petani migran kelas menengah (24%) yang berasal dari luar wilayah umumnya beretnis Jawa dan Batak dengan rata-rata ukuran lahan 6,6 hektar; petani asli menengah (8%) merupakan petani skala menengah asli Melayu dengan kepemilikan lahan rata-rata 6,9 hektar; petani skala besar perintis bukaan lahan baru (1%) yang umumnya berasal dan tinggal di kota besar seperti Medan, Pekanbaru dan Jakarta dengan rata-rata ukuran perkebunan sawit sebesar 217,8 hektar; dan produsen besar terkonsolidasi (1%) yakni petani besar yang berasal dari luar kabupaten namun tinggal di kecamatan yang sama dengan perkebunannya dengan kepemilikan lahan rata-rata 91,3 hektar. Idsert dan Schoneveld (2016) menemukan bahwa sebagian besar petani yang mengelola lahan sawit yang

diklasifikasikan sebagai lahan untuk budidaya petani kecil sawit tidak tepat diklasifikasikan sebagai petani kecil sawit karena merupakan kelompok produsen yang beroperasi selayaknya bisnis. Kelompok petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 3 ha atau dikategorikan sebagai petani kecil mencakup 66% dari jumlah penduduk namun hanya mengelola 21% lahan, kelompok petani dengan kepemilikan 3.1-15 hektar mengelola 35% lahan dan kelompok petani dengan kepemilikan lebih dari 15 hektar mengelola 44% lahan. Untuk mengatasi keterbatasan data, Idsert dan Schoneveld (2016) menentukan sampel petani kecil dalam penelitiannya di Provinsi Riau secara spasial melalui interpretasi visual citra satelit Google Earth.

Menurut undang-undang No. 44 Tahun 2014 tentang perkebunan, luas maksimum perkebunan rakyat (petani) adalah 25 ha. Dengan demikian luas kepemilikan lahan yang dimiliki petani bervariasi mulai dari kurang dari 1 hektar hingga 25 hektar. Hal ini berimplikasi pada pengelompokan beberapa jenis petani sawit dalam masyarakat seperti yang dijelaskan dalam literatur di atas. Petani yang diteliti dalam penelitian ini adalah petani kecil swadaya kelapa sawit dengan luas lahan sawit yang relatif kecil (\pm 2-5 Hektar). Di dalam literatur, beberapa istilah yang digunakan untuk petani swadaya kelapa sawit seperti petani rakyat, petani kelapa sawit, pekebun swadaya, petani mandiri, dll. Untuk alasan penyederhanaan dan konsistensi maka pada bagian selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan istilah "petani kecil swadaya sawit" untuk merujuk pada petani kelapa sawit yang memiliki luas lahan yang relatif sempit dan mengusahakan kelapa sawit secara mandiri.

Inobu (2016) mengemukakan kondisi data petani kecil swadaya sawit cukup sulit untuk didapatkan karena belum tersedianya data resmi petani berskala kecil. Kondisi ini menjadikan cukup sulit untuk mengetahui jumlah pasti dan lokasi lahan petani kecil swadaya sawit karena keberadaan petani kecil swadaya sawit cukup rumit terlacak dan belum banyak dikaji secara mendalam serta belum dimonitor dalam rantai pasok minyak kelapa sawit (Inobu 2016). Inobu (2016) dalam penelitiannya melakukan survei dan pemetaan petani sawit mandiri secara langsung di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Sekalipun belum tersedia data yang memadai, tidak dapat dipungkiri jika petani kecil swadaya sawit merupakan bagian dari mata rantai pasokan kelapa sawit secara global dan berkontribusi dalam posisi Indonesia sebagai negara pengekspor CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Meski menjadi bagian dari rantai pasok global kelapa sawit, posisi petani kecil dalam industri kelapa sawit nasional masih lemah dibanding dengan posisi perusahaan perkebunan kelapa sawit milik swasta dan BUMN ataupun dengan petani-petani plasma dan petani mandiri besar (Idsert dan Schoneveld 2016; Inobu 2016). Selain itu, petani kecil swadaya sawit di Indonesia diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang merugikan dari sisi ekonomi (Pramudya et al. 2015).

Tantangan Ekonomi Petani Kecil Swadaya Sawit

Tantangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tantangan-tantangan dari sisi sosial ekonomi dilihat dari sudut pandang petani yakni kendala yang dialami oleh petani kecil swadaya sawit dalam mengelola kebun sawit yang dimilikinya sehingga belum optimal mencapai tujuannya yakni untuk mendapatkan keuntungan/penghasilan yang memadai. Menurut Pohan (2015) tantangan-tantangan berupa permasalahan perekonomian petani dalam membudidayakan kelapa sawit yakni fluktuasi harga merupakan permasalahan ekonomis yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat petani. Pohan (2015) juga menyatakan tantangan utama yang dihadapi oleh

petani sawit swadaya adalah fluktuasi atau harga jual TBS yang tidak stabil memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi sosial ekonomi petani.

Menurut Pramudya et al (2015), lima tantangan utama petani swadaya yakni memiliki posisi tawar yang lemah karena tidak bisa mempengaruhi bahkan tidak mengetahui proses penentuan harga TBS, petani swadaya menggunakan bibit yang tidak berkualitas sehingga produktivitasnya rendah, kualitas TBS yang dihasilkan rendah, tidak memiliki legalitas kepemilikan tanah sehingga terlibat dalam konflik pemilikan lahan dan mayoritas petani swadaya tidak berorganisasi sehingga menghambat dalam akses dana, akses pasar dan akses input. Tantangan pokok dari sudut pandang petani adalah permasalahan perekonomian yang dihadapinya.

Daemeter (2015) merumuskan 4 tantangan utama petani sawit Indonesia yakni tantangan produktifitas lahan, tantangan struktural, tantangan legalitas dan tantangan keuangan. Pertama, tantangan produktifitas lahan berkaitan rendahnya produktifitas petani sehingga petani kehilangan keuntungan yang secara substansi mempengaruhi penghidupan petani sehingga petani membutuhkan dukungan untuk meningkatkan produktifitas mereka termasuk dalam hal ini biaya *replanting* yang terlalu tinggi bagi petani sehingga berpengaruh pada produktifitasnya. Kedua, tantangan struktural terkait dengan berbagai model transaksi bagi petani sawit sekalipun berada di wilayah yang sama sehingga mengakibatkan tantangan logistik dan infrastruktur seperti akses input, akses pasar, biaya transaksi yang berbeda bagi petani sehingga mengakibatkan kebingungan bagi masyarakat karena dengan model transaksional yang berbeda maka penghasilan bersih bisa jadi sangat berbeda. Ketiga, tantangan legalitas mencakup penggundulan/penggunaan hutan untuk pembukaan lahan, pembukaan lahan dengan cara membakar dan sedikitnya jumlah petani yang memiliki bukti kepemilikan resmi atas lahan yang dikelolanya. Ketiadaan Sertifikat Hak Milik atas lahan yang dikelola mengakibatkan petani tidak dapat menggunakan lahannya sebagai jaminan untuk mengakses pendanaan ke bank, tidak dapat membangun kemitraan dengan perusahaan dan menghadapi risiko perampasan/konflik lahan. Keempat, tantangan keuangan yakni harga jual TBS mencakup lebih rendahnya harga jual TBS yang diterima petani dari harga yang ditetapkan pemerintah, fluktuasi harga TBS dan lemahnya posisi tawar petani serta ketidaktahuan petani akan harga yang ditetapkan. Harga jual TBS menjadi faktor penentu utama dalam penghasilan petani yang berdampak besar pada penghidupan petani khususnya petani yang mengandalkan sawit sebagai sumber penghasilan utama. Inobu (2016) dalam penelitiannya tentang Seluk Beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit Secara Swadaya menyatakan hambatan utama yang dihadapi petani swadaya adalah pengakuan hukum hak-hak atas tanah mereka; akses terhadap pendanaan, material tanaman, pupuk dan pelatihan; persyaratan perdagangan dan harga yang adil dari penjualan TBS; lokasi plot perkebunan petani swadaya; dan rantai pasok antara pekebun dan pabrik kelapa sawit .

Petani kecil membutuhkan pendanaan yang besar untuk biaya operasional mengusahakan kebun kelapa sawit (membangun, memelihara, meremajakan) namun petani kecil memiliki sumber pendanaan yang terbatas (Sahara et al. 2018). Meningkatkan akses petani terhadap kredit dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi pertanian dapat meningkatkan akses petani terhadap benih bersertifikasi, pupuk dan input pertanian berkualitas lainnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas (Sahara et al. 2018). Hanya sebagian kecil petani di Indonesia yang memenuhi syarat untuk dapat mengakses kredit secara formal pada bank atau lembaga pembiayaan lainnya.

Kubitza et al. (2018) menemukan bahwa dampak ekologi negatif dari perluasan lahan sawit telah lebih banyak diteliti dibandingkan dengan dampak sosial ekonominya khususnya bagi petani. Dampak positif dari meluasnya perkebunan sawit dalam pembangunan daerah rural Indonesia seperti meningkatnya pendapatan petani, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum kurang dihargai oleh

ilmuwan lingkungan hidup (Naylor et al. 2019). Adapun dampak ekologi atau lingkungan dari budidaya kelapa sawit lebih terkait dengan keberlanjutan/*sustainability*. Terkait dengan hal tersebut, berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi petani sawit swadaya terkait dengan isu keberlanjutan/*sustainability* telah banyak diteliti (Agustira et al. 2014; Sibarani et al. 2015; Hidayat 2016; Hutabarat 2017a; Hutabarat 2017b). Berbagai tantangan yang dihadapi petani sawit swadaya seperti akses informasi dan teknologi, akses input (faktor produksi), akses finansial, akses pasar ditemukan sebagai penghambat akses menuju sertifikasi keberlanjutan dan pasar global (Hutabarat 2017b).

Kelembagaan Petani Kecil Swadaya

Suharno et al. (2015) menjelaskan bahwa petani kecil mandiri kurang produktif secara signifikan dibandingkan dengan petani kecil yang tergabung dalam pola kemitraan dengan perkebunan inti. Terdapat tiga pola kemitraan yang diteliti oleh Suharno et al. (2015) di 3 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yakni pola kemitraan perusahaan kelapa sawit (inti) dan petani (plasma) yang dikelola oleh koperasi milik petani, pola kemitraan inti-plasma yang dikelola oleh perusahaan dan pola kemitraan inti-plasma yang dikelola oleh petani sendiri melalui kelompok tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbaik adalah pola kemitraan inti-plasma yang dikelola oleh koperasi milik petani. Dengan pola kemitraan ini, petani mendapatkan pendapatan tertinggi, produktivitas TBS tertinggi, risiko usaha dapat ditanggung bersama serta ada jaminan *supply chain* dan pemasaran hasil melalui kerjasama dengan perusahaan inti. Saputra et al. (2017) menemukan bahwa pola kemitraan inti plasma antara kelompok tani Telaga Biru dan PT Sawindo Kencana yang dikelola melalui koperasi di Bangka Barat, Bangka Belitung juga menunjukkan hasil yang positif. Penelitian ini menganalisa pola kemitraan usaha tani kelapa yang telah berjalan namun hanya terbatas pada satu kelompok tani yang berlokasi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

Di sisi lain, Gunawan et al. (2018) dalam penelitian di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menemukan bahwa munculnya petani swadaya merupakan bentuk kritik dan kekecewaan petani terhadap praktik kemitraan usaha perkebunan. Lebih lanjut Gunawan et al. (2018) juga menemukan bahwa dari tiga pola kemitraan yakni pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KPPA) dan Pola Satu Manajemen (PSM) maka pola KPPA dan PSM yang dikelola penuh oleh perusahaan merupakan dua pola kemitraan yang menimbulkan banyak permasalahan sehingga membuat para petani enggan untuk bergabung.

Berdasarkan ulasan diatas, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani kecil kelapa sawit seperti fluktuasi harga jual tandan buah segar (TBS) penurunan harga sawit memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi petani sawit di Pantai Timur Sumatera Utara (Pohan 2015), walaupun tidak terdapat perbedaan produksi TBS yang signifikan namun pendapatan penjualan TBS petani plasma dan petani mandiri berbeda secara signifikan karena perbedaan harga TBS yang diterima (Wildayana 2016), produktivitas rendah yakni 15,9 ton TBS/ha/tahun dibandingkan dengan petani plasma 22,1 ton TBS/ha/tahun (Hutabarat 2017a), kendala legalitas lahan yakni sebagian besar petani swadaya tidak memiliki sertifikat hak milik lahan, keterbatasan dana dan akses dana dimana hanya sebagian kecil dari petani swadaya yang mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, *good agricultural practice* yang buruk dengan menanam bibit yang tidak resmi dengan pemupukan dan pemeliharaan tidak sesuai standar budidaya sawit, infrastruktur yang buruk yakni kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan, belum terhubung dengan kelembagaan petani dengan tidak bergabung dalam organisasi petani (Daemeter 2015; Idsert dan Schoneveld 2016; Inobu 2016; Hidayat 2017). Petani sawit swadaya berskala kecil membudidayakan sawit hampir tanpa dukungan dari pemerintah atau perusahaan perkebunan, kondisi ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas TBS yang dihasilkan (Inobu 2016). Usaha perkebunan yang dikelola petani biasanya tidak berbadan hukum dan dikelola sendiri

dengan menggunakan tenaga kerja keluarga. Petani kelapa sawit melakukan budidaya kelapa sawit berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki tanpa mengikuti pelatihan dan penyuluhan mengenai budidaya kelapa sawit (Sibarani et al. 2015). Hal ini disebabkan karena para petani tidak membentuk kelompok tani atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani kelapa sawit swadaya (Sibarani et al. 2015). Tantangan petani swadaya lainnya khususnya terkait isu keberlanjutan yakni akses input (bibit, pupuk), akses informasi dan teknologi, akses finansial, akses pasar (Sibarani et al 2015; Hutabarat 2017a).

Dengan posisi yang rentan dan belum banyak tersentuh oleh kebijakan pemerintah serta memiliki akses yang terbatas maka peneliti tertarik mengetahui (1) permasalahan atau tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit; (2) tantangan kelembagaan dan alasan para petani kecil swadaya sawit tidak bergabung dalam suatu lembaga pekebun; (3) solusi yang diharapkan oleh petani kecil swadaya sawit. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit dari perspektif para petani dan solusi yang mereka harapkan sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat kebijakan yang berpihak dan berdampak langsung pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan petani kecil swadaya sawit; (2) untuk mengetahui tantangan kelembagaan dan penyebab petani kecil swadaya sawit tidak bergabung dalam suatu lembaga pekebun sehingga dapat memberikan solusi dan rekomendasi yang tepat sasaran; (3) untuk mengetahui solusi yang diharapkan oleh petani kecil swadaya sawit dari perspektif petani. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang meneliti petani secara umum atau petani kecil swadaya di satu atau dua wilayah tertentu (kecamatan, kabupaten atau provinsi) maka penelitian ini meneliti petani kecil swadaya yang berasal dari 14 provinsi di Indonesia. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat melihat secara umum kondisi petani kecil swadaya di Indonesia, menjadi sarana sosialisasi pentingnya petani kecil untuk dapat bergabung dalam suatu lembaga pekebun dan hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menyusun strategi pengembangan ekonomi lokal bagi para petani kecil swadaya sawit.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah 150 petani kecil swadaya sawit yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan di program diploma tiga Politeknik LPP Yogyakarta dengan beasiswa penuh berupa dana pendidikan dan biaya hidup dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Survei dengan menggunakan kuesioner dilakukan dengan metode wawancara via telepon selama bulan Desember 2019. Dari total 150 kuesioner terdapat 120 kuesioner yang kembali dengan 11 data tidak memenuhi syarat penelitian karena terdapat responden yang bukan petani swadaya sawit yakni buruh sawit (3 responden) dan petani plasma (7 responden). Sementara itu 1 data lainnya tidak memenuhi syarat penelitian karena pengisian data terindikasi tidak valid. Dengan demikian terdapat 109 data responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Responden berasal dari 14 provinsi yang terletak di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebanyak 55,96% atau sebagian besar dari responden berasal dari 2 provinsi sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia yakni Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Terdapat 11,01% responden berasal dari Provinsi Jambi dan 9,18% dari Kalimantan Barat. Sementara itu, 23,85% responden lainnya tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Sebaran data responden di 14 provinsi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sebaran Responden di 14 Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Aceh	7	6,42
2	Sumatera Utara	30	27,52
3	Sumatera Barat	3	2,75
4	Riau	31	28,44
5	Jambi	12	11,01
6	Bengkulu	1	0,92
7	Sumatera Selatan	2	1,83
8	Bangka Belitung	1	0,92
9	Kep. Bangka Belitung	1	0,92
10	Lampung	3	2,75
11	Kalimantan Barat	10	9,18
12	Kalimantan Selatan	1	0,92
13	Kalimantan Tengah	2	1,83

14	Kalimantan Timur	5	4,59
JUMLAH		109	100

Sumber: Data Primer (2019)

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode survei. Menurut Effendi (2012), penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bersifat terbuka dan masih mencari-cari karena pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti tipis. Metode survei merupakan suatu cara pengambilan sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode survei merupakan metode paling baik guna memperoleh dan mengumpulkan data asli untuk mendeskripsikan keadaan populasi (Sukardi 2017). Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan dengan metode angket (kuesioner) dengan komunikasi via telepon.

Setelah mendapatkan data primer berupa kuesioner yang sudah dijawab, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengadministrasi data-data tersebut untuk selanjutnya dianalisa. Proses pengadministrasian data dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa kesesuaian responden yang dibutuhkan yakni petani kecil swadaya, memeriksa kelengkapan jawaban responden pada kuesioner yang telah dikumpulkan, melakukan pembobotan data (*scoring*) dan proses tabulasi dengan *excel*. Selanjutnya data yang telah diadministrasi tersebut dianalisa secara statistik deskriptif yakni dengan mencari nilai rata-rata dan persentase dengan menggunakan program *excel*.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Idsert dan Schoneveld 2016) petani kecil swadaya memiliki beragam karakteristik sehingga perlu untuk mengidentifikasi karakteristik khusus di tiap kelompok agar dapat merekomendasikan dan menyusun kebijakan dan prioritas yang tepat. Untuk mengetahui karakteristik/profil petani kecil swadaya sawit yang diteliti dalam penelitian ini maka dilakukan survei untuk mengetahui deskripsi umum petani kecil swadaya meliputi:

- a. Pendidikan Petani
- b. Umur Petani
- c. Jumlah Tanggungan per petani
- d. Penduduk asli / pendatang
- e. Profil Kebun Kelapa sawit meliputi luas areal, umur tanaman, harga jual TBS terakhir, rata-rata produksi TBS per bulan, rata-rata penjualan TBS per bulan, jarak lahan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
- f. Petani mengusahakan komoditi lain
- g. Petani memiliki pekerjaan/usaha lain

Untuk menjelaskan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh petani kecil swadaya dalam penelitian ini maka variabel yang akan disurvei dalam penelitian adalah:

- a. Harga jual TBS
- b. Legalitas Lahan & Infrastruktur Jalan
- c. Akses Pasar
- d. Akses dana
- e. Daya Beli Input Produksi
- f. Praktek Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practice*)

g. Kebijakan/Intervensi Pemerintah yang diterima petani

Aspek kelembagaan petani menjadi bagian penting untuk disurvei guna memetakan keikutsertaan petani kecil swadaya sawit dalam organisasi petani, alasan tidak bergabung dalam organisasi petani dan mengetahui model kelembagaan yang diharapkan petani. Dengan demikian aspek kelembagaan yang disurvei meliputi:

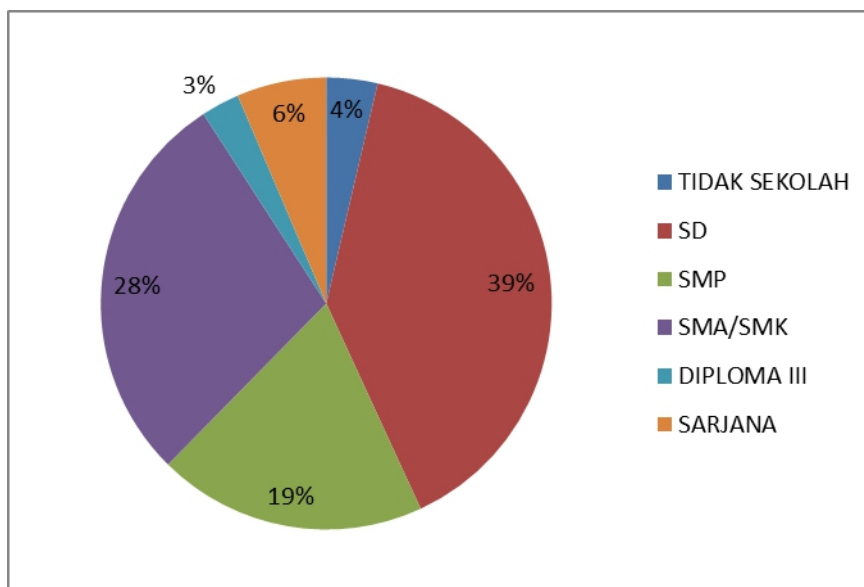
- a. Keikutsertaan Dalam Organisasi Petani Sawit
- b. Alasan tidak bergabung dalam organisasi petani sawit
- c. Model kelembagaan yang diinginkan petani kecil swadaya sawit

Untuk mengetahui solusi yang diharapkan petani kecil swadaya sawit maka diberikan pertanyaan terbuka tentang solusi yang diharapkan baik itu secara umum maupun secara khusus dari pemerintah pusat/daerah dan perusahaan perkebunan/pabrik kelapa sawit (PKS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Petani Kecil Swadaya Sawit

Sebagian besar petani swadaya sawit telah mengikuti pendidikan formal dengan jumlah tertinggi menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 39% disusul dengan lulusan pendidikan tingkat atas SMA/SMK 28% dan pendidikan tingkat menengah SMP 19%. Sementara itu, 13% sisanya terdapat 3% yang tidak pernah bersekolah, 6% lulusan sarjana/master dan 4% lulusan program diploma. Data disajikan dalam Gambar 2 dibawah ini:



Sumber: Data Primer (2019)

Gambar 2. Tingkat Pendidikan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia

Deskripsi umum petani kecil swadaya sawit selanjutnya meliputi umur petani, jumlah tanggungan per petani, asal petani apakah penduduk asli atau pendatang, luas

areal kelapa sawit (KS), umur tanaman KS, harga jual TBS terakhir, produksi TBS per bulan, penjualan TBS per bulan, jarak dari kebun ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terdekat, petani mengusahakan komoditi lain, petani memiliki pekerjaan/usaha lain seperti yang disajikan dalam Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Variabel dan Deskripsi Umum Petani Kecil Swadaya Sawit

No	Variabel	Deskripsi	Rata-Rata
1	Umur Petani	Tahun	51,26
2	Jumlah Tanggungan per petani	Orang	5
3	Penduduk asli	%	54
4	Luas Areal KS	Hektar	2,35
5	Umur Tanaman KS	Tahun	12,26
6	Harga Jual TBS terakhir*	Rupiah per Kg	1.304,46
7	Produksi TBS per bulan	Ton	1,73
8	Penjualan TBS per bulan	Rupiah	2.282.384,91
9	Jarak ke PKS	Kilometer	18,91
10	Mengusahakan komoditi lain	%	41
11	Memiliki pekerjaan/usaha lain	%	59

Sumber: Data Primer (2019)

Keterangan: * = merupakan harga jual TBS pada saat survei dilakukan yakni pada bulan Desember 2019

Rata-rata umur petani kecil swadaya sawit adalah 51,26 tahun, 54% merupakan penduduk asli dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggung rata-rata 5 orang per petani. Rata-rata luas lahan kebun sawit yang dikelola adalah seluas 2,35 hektar dan tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan rata-rata berumur 12,26 tahun. Rata-rata produksi TBS per bulan berkisar pada angka 1,73 ton dengan harga jual TBS per kg rata-rata sebesar Rp. 1.304,46. Harga jual TBS sangat bervariasi dari yang terendah Rp. 700,00/kg dan tertinggi Rp. 1.760,00/kg. Hasil dari penjualan TBS per bulan rata-rata Rp. 2.282.384,91. Jarak lahan petani ke PKS terdekat juga cukup bervariasi dengan rata-rata berjarak 18,91 km. Sebanyak 41% petani mengusahakan komoditi lain seperti karet,

kakao, kopi, kemiri, cengkeh, lada, jeruk nipis, rambutan, duku, ubi kayu, jagung, nanas dan kacang tanah sebagai sumber penghasilan tambahan. Selain itu, 59% petani memiliki usaha/pekerjaan lain seperti usaha dagang, bengkel/repairasi, beternak, buruh hingga karyawan pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tantangan Ekonomi Petani Kecil Swadaya Sawit

8. Harga Jual TBS Berfluktuasi dan Rendah

Tabel 3. Variabel dan Deskripsi Harga Jual TBS

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Harga Jual TBS Stabil	1 = Ya ; 0 = Tidak	15
2	Harga Jual Saat Ini Menguntungkan	1 = Ya ; 0 = Tidak	70

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan survei, hanya 15% dari petani kecil swadaya sawit yang menilai jika harga jual TBS stabil dan 85% lainnya menilai harga jual TBS tidak stabil (berfluktuasi). Petani kecil swadaya sawit mengeluhkan harga jual TBS yang tidak stabil dan dapat turun drastis (anjlok) ke harga Rp. 200,00 per kg. Hal ini menjadi tantangan petani kecil swadaya sawit yang sebagian besar berharap agar harga jual TBS dapat lebih stabil karena pendapatan pekebun swadaya bergantung pada harga jual TBS. Petani kecil swadaya sawit juga mengeluhkan harga jual TBS yang berbeda secara signifikan antara satu agen/perusahaan dengan yang lainnya walaupun berada dalam wilayah yang sama. Hasil survei menunjukkan harga jual TBS yang diterima petani pada saat survey dilakukan sangat bervariasi dari harga terendah Rp. 700/kg hingga harga tertinggi Rp. 1.760/kg. Dari rentang harga tersebut terdapat selisih yang besar yakni Rp. 1.160/kg. Harga jual TBS yang diterima petani rata-rata berada di harga Rp. 1.304,46/kg (Tabel 2). Sementara itu, 70% petani kecil swadaya sawit yang disurvei menyatakan harga TBS/kg sebesar rata-rata 1.304,46 (Tabel 2) merupakan harga jual yang cukup menguntungkan bagi petani kecil swadaya sawit saat ini.

Agustira et al. (2015) menyatakan bahwa permasalahan utama petani sawit saat ini adalah rendahnya produktifitas diantaranya karena penggunaan bahan tanaman palsu (ilegitim), rendahnya penerapan kultur teknis, perlambatan *replanting* dan lemahnya institusi/kelompok tani serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial petani. Oleh karena hal tersebut maka pendapatan perkebunan petani kelapa sawit belum optimal dan belum memenuhi prinsip keberlanjutan. Penelitian ini mengajukan hasil yang berbeda yakni permasalahan atau tantangan utama yang dihadapi petani sawit dari sudut pandang petani adalah ketidakpastian yang tinggi karena fluktuasi harga jual TBS. Menurut 85% petani kecil swadaya sawit yang disurvei dalam penelitian ini, harga jual TBS berfluktuasi. Penghasilan petani dari penjualan sawit menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi akibat fluktuasi harga dan rendahnya harga yang diterima petani kecil swadaya yakni mencapai Rp. 200,00/kg. Selain itu, terdapat harga jual TBS yang bervariasi di kalangan petani pada periode yang sama (Desember 2019) yakni terendah Rp. 700,00/kg dan tertinggi Rp. 1.760,00 menunjukkan terjadinya asimetri informasi harga TBS di kalangan petani sekaligus mengindikasikan ketidakberesan dalam penetapan harga TBS. Sekalipun harga jual TBS sebesar Rp. 1.304,46/kg cukup menguntungkan namun tidak ada jaminan harga TBS pada level ini akan terus stabil.

Sebagian besar petani juga menilai harga jual TBS yang diterima tersebut tidak sesuai dengan harapan karena harga jual yang diterima petani lebih rendah daripada standar harga yang ditetapkan atau berlaku bagi pihak lain.

Menurut Daemeter (2015), harga jual TBS merupakan faktor penentu pendapatan petani sawit. Harga TBS tersebut ditetapkan berdasarkan harga rata-rata CPO terbaru di global market dan penetapan harga oleh pemerintah provinsi berdasarkan formula tertentu. Harga TBS diperbaharui setidaknya seminggu sekali atau setiap minggu. Namun harga tersebut merupakan biaya pra-transaksi (*pre-transaction cost*) yang masih harus memperhitungkan biaya transportasi, sortasi, rendemen/*yield loss*, biaya bongkar muat dan biaya-biaya lainnya sehingga petani sawit swadaya biasanya menerima harga jual TBS lebih rendah 40% dari harga tersebut. Lebih lanjut Daemeter (2015) menyatakan jika fluktuasi harga TBS sebagai dampak dari fluktuasi harga CPO dunia berpengaruh signifikan terhadap keuntungan dan arus kas yang diterima petani. Pada saat harga TBS tinggi maka petani bisa mendapatkan keuntungan yang setara dengan upah minimum wilayah namun pada saat harga TBS rendah maka pendapatan petani anjlok kurang dari setengah upah minimum wilayah.

Hasil penjualan TBS per bulan rata-rata sebesar Rp. 2.282.384,91 sebelum dipotong dengan biaya-biaya perusahaan sawit yang dikeluarkan dimana jumlah ini merupakan pendapatan kotor petani kecil sawit swadaya pada saat harga jual TBS relatif tinggi yakni Rp. Rp. 1.304,46 / kg (Tabel 2). Pada saat harga jual TBS turun maka jumlah yang didapatkan petani juga menjadi lebih rendah. Dengan pendapatan yang tidak pasti dari penjualan TBS, petani kecil swadaya sawit diperhadapkan pada biaya perusahaan sawit yang cukup tinggi sekaligus kebutuhan untuk menghidupi rata-rata 5 orang anggota keluarga. Hal ini menjadikan para petani kecil swadaya sawit mengupayakan sumber penghasilan alternative dengan menanam komoditi lain (41% petani) dan memiliki pekerjaan/usaha lain selain berkebun sawit (59% petani). Data ini menunjukkan dari sudut pandang petani bahwa hanya bertani sawit saja belum bisa diandalkan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini berbanding terbalik dengan kontribusi industri sawit dari ekspor CPO secara nasional yang telah menjadi komoditi andalan untuk devisa negara yang telah melampaui nilai ekspor minyak dan gas.

Bagi petani, keuntungan secara keuangan menjadi hal terpenting dan merupakan motivasi utama untuk dapat berpartisipasi dalam sertifikasi berkelanjutan (Hidayat et al. 2015) dengan demikian permasalahan perekonomian petani perlu diselesaikan sebelum dapat mengatasi isu keberlanjutan pada sisi petani. Tantangan terkait isu keberlanjutan nampaknya belum menjadi perhatian utama petani karena bagi petani keuntungan finansial untuk memperoleh penghidupan yang memadai merupakan hal yang paling utama.

9. Legalitas Lahan Baik Namun Infrastruktur Kurang Memadai

Tabel 4. Variabel dan Deskripsi Legalitas Lahan dan Infrastruktur

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Memiliki Bukti Legalitas Lahan	1 = Ya ; 0 = Tidak	84
2	Jalan mudah dilalui mobil/truk sepanjang tahun (kondisi kemarau & hujan)	2 = Ya ; 0 = Tidak	39

Sumber: Data Primer (2019)

Sebanyak 84% dari pekebun swadaya telah memiliki bukti kepemilikan lahan. Baik petani yang berasal dari penduduk asli maupun pendatang sama-sama menyebutkan tidak ada kendala untuk memiliki bukti legalitas lahan. Temuan ini mendukung penelitian Inobu (2016) di Kotawaringin Barat menunjukkan sebagian besar (60%) petani memiliki sertifikat tanah (sertifikat hak milik). Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Daemeter (2015) menyatakan bahwa petani kecil swadaya umumnya tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan dan hanya memiliki surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Hasil ini juga berbeda dengan Sahara et al (2018) yang menemukan bahwa sebagian besar petani kecil swadaya tidak memiliki sertifikat tanah mengingat mahalnya biaya yang dikeluarkan serta proses administrasi yang rumit bagi petani.

Hasil survei untuk infrastruktur jalan menunjukkan akses transportasi yang bisa dilalui kendaraan baik pada musim kering maupun musim hujan masih menjadi kendala tersendiri bagi petani. Terdapat 39% petani swadaya yang menilai akses transportasi di wilayahnya sudah baik dan 61% sisanya menilai infrastruktur jalan belum memadai. Kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan mengakibatkan tingginya biaya transportasi pasca panen karena dibutuhkan kendaraan khusus untuk dapat melalui jalan yang rusak. Hal ini diperburuk dengan jarak antara lokasi lahan petani kecil swadaya sawit dengan pabrik kelapa sawit relatif jauh yakni rata-rata 18,91 km (Tabel 2).

10. Akses Pasar: Minimnya Akses Langsung ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Tabel 5. Variabel dan Deskripsi Akses Pasar

No	Variabel	Deskripsi	Persentase "Ya" (%)
1	Petani mudah mendapatkan pembeli TBS	1 = Ya ; 0 = Tidak	94
2	Petani menjual TBS ke pengepul/tengkulak/agen	1 = Ya ; 0 = Tidak	91
3	Petani menjual TBS ke Pabrik Kelapa Sawit	1 = Ya ; 0 = Tidak	11
4	Lokasi untuk melakukan transaksi penjualan TBS mudah dijangkau	1 = Ya ; 0 = Tidak	82
5	Petani menerima pembayaran atas penjualan TBS pada saat transaksi	1 = Ya ; 0 = Tidak	79
6	Harga yang ditetapkan pembeli sesuai dengan harapan petani	1 = Ya ; 0 = Tidak	25

Sumber: Data Primer (2019)

Petani kecil swadaya sawit cenderung tidak mengalami kendala dalam menjual hasil panen, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei yakni 94% petani kecil swadaya sawit mudah untuk mendapatkan pembeli. Dalam hal ini, petani kecil swadaya sawit menjual hasil panennya kepada pengepul/tengkulak/agen (91%) dan/atau ke pabrik kelapa sawit/PKS (11%). Lokasi untuk melakukan transaksi penjualan juga mudah dijangkau

oleh 82% petani kecil swadaya sawit. Sebanyak 79% petani kecil swadaya sawit juga menerima pembayaran atas penjualan TBS pada saat transaksi. Hal ini sejalan dengan temuan Daemeter (2015) bahwa walaupun secara teknis petani kecil swadaya sawit bebas memilih agen untuk menjual TBS mereka namun pada umumnya petani kecil swadaya menjual TBS mereka ke satu agen/pembeli tetap. Tujuannya adalah untuk mengamankan penjualan TBS karena karakteristik TBS yang harus dijual dalam waktu 24-48 jam setelah panen.

Terlepas dari persoalan rendahnya kualitas TBS petani kecil swadaya sawit, panjangnya rantai pasokan yang menghubungkan petani kecil swadaya ke pabrik kelapa sawit dibandingkan dengan petani lainnya yang dapat terhubung langsung berimplikasi pada harga yang diterima petani kecil swadaya lebih rendah karena besarnya variasi biaya transaksi dan rentan terhadap permainan harga (Daemeter 2015). Hanya 11% petani dalam penelitian ini yang memiliki akses untuk menjual TBS langsung ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sebagian besar petani kecil swadaya sawit mengandalkan agen/tengkulak untuk membeli TBS mereka, berbeda dengan petani besar yang dapat mengontrol penjualan TBSnya ataupun petani plasma yang memiliki akses ke PKS. Inobu (2016) menemukan bahwa jarang sekali petani kecil swadaya sawit yang menjual TBS langsung ke pabrik kelapa sawit.

Meskipun petani kecil swadaya sawit dapat mengamankan penjualan TBSnya kepada pembeli dan hampir semua (94%) petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pembeli tetap namun harga yang ditetapkan pembeli dalam hal ini pengepul/tengkulak/agen dan pabrik kelapa sawit belum sesuai dengan harapan 75% petani kecil swadaya sawit (Tabel 5). Angka ini menunjukkan ketidakpuasan petani kecil swadaya sawit terhadap harga jual TBS yang diterima. Hal ini ditambah dengan rata-rata jarak lahan petani ke PKS yang cukup jauh yakni 18,91 km (Tabel 2) dengan 61% infrastruktur jalan yang belum memadai (Tabel 4) sehingga sulit dilalui kendaraan dan menjadikan biaya transportasi lebih tinggi. Sementara itu, kualitas TBS yang tidak langsung masuk ke pabrik akan menurun dan pada akhirnya berimplikasi pada harga jual TBS yang lebih rendah. Semua ini kembali menjadi beban bagi petani yang mengurangi pendapatan mereka dari hasil penjualan TBS.

11. Akses Dana Terbatas

Tabel 6. Variabel dan Deskripsi Akses Dana

No	Variabel	Deskripsi	Persentase "Ya" (%)
1	Dana Sendiri	1 = Ya ; 0 = Tidak	94
2	Pinjaman dari keluarga/kerabat/teman	1 = Ya ; 0 = Tidak	22
3	Pinjaman dari bank/koperasi/lembaga keuangan lainnya	1 = Ya ; 0 = Tidak	17
4	Pinjaman dari pengepul TBS	1 = Ya ; 0 = Tidak	25

Sumber: Data Primer (2019)

Hampir seluruh petani kecil swadaya (94%) mengusahakan kebun sawit dengan dana mandiri (*self funding*) dan sebagian kecil (6%) mendapatkan pendanaan dari pinjaman. Hasil survei juga menunjukkan terdapat proporsi petani yang menggunakan pendanaan campuran (*mix funding*) baik dari dana sendiri dan sumber lain. Terdapat 22 – 25% yang memiliki pendanaan campuran (*mix funding*) dari sumber pinjaman informal seperti keluarga/teman dan tengkulak. Jumlah petani yang mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal seperti bank/koperasi/lembaga keuangan lainnya lebih sedikit yakni hanya 17%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sahara et al (2018) yang menunjukkan bahwa sejumlah petani kecil swadaya sawit mengakses pinjaman informal melalui pedagang lokal (tengkulak/pengepul TBS) karena walaupun nilai/jumlahnya terbatas namun petani tidak diberi persyaratan khusus seperti periode kredit/tenor, biaya ataupun bunga dan hanya sebatas perjanjian lisan. Skema pembiayaan ini mudah dan terjangkau bagi petani kecil swadaya karena untuk pembayarannya pun dapat dilakukan petani setiap kali menjual TBS.

Terdapat petani kecil swadaya mencari pinjaman langsung ke bank/lembaga keuangan namun hanya sebagian kecil dari aplikasi pengajuan kredit petani sawit disetujui oleh bank/lembaga keuangan karena petani tidak memenuhi uji kelayakan yang disyaratkan bank (Sahara et al. 2018). Hutabarat (2017) juga menemukan bahwa lembaga keuangan umumnya tidak memberikan pinjaman kepada petani kecil swadaya sawit karena risiko gagal bayar yang dianggap cukup besar. Petani umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada kelebihan pendapatan untuk dapat membayar cicilan atau bunga pinjaman. Kondisi yang dihadapi petani kecil swadaya sawit sedikit berbeda dengan petani plasma yang dapat mengakses pinjaman melalui koperasi dan perusahaan inti sawit ataupun ke bank dengan penjamin yakni koperasi atau perusahaan. Daemeter (2015) menyatakan bahwa petani kecil swadaya hanya dapat mengakses pinjaman informal dari agen (tengkulak/pengepul) atau juga berpotensi untuk mendapatkan pinjaman dari credit union setempat. Inobu (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa hanya 13,8% petani memiliki tabungan di bank dan hanya 7,7% memiliki akses terhadap pinjaman bank. Hasil diatas menunjukkan jika petani kecil swadaya sawit memiliki akses dana untuk pinjaman/pendanaan yang terbatas.

12. Daya Beli Input Produksi Rendah

Tabel 7. Variabel dan Deskripsi Daya Beli Kebutuhan Budidaya

No	Variabel	Deskripsi	Persentase “Ya” (%)
1	Harga bibit unggul kelapa sawit tidak terjangkau	1 = Ya ; 0 = Tidak	70
2	Harga pupuk kelapa sawit tidak terjangkau	1 = Ya ; 0 = Tidak	65
3	Dana tidak mencukupi untuk mengelola kebun	1 = Ya ; 0 = Tidak	72

Sumber: Data Primer (2019)

Bagi 70% petani kecil swadaya sawit menilai harga bibit kelapa sawit tidak terjangkau dan 65% menilai harga pupuk tidak terjangkau. Sebanyak 72% petani menyatakan jika dana yang mereka gunakan yang sebagian besar bersumber dari dana mandiri (Tabel 6) tidak mencukupi untuk mengelola kebun sawit mereka. Petani kecil swadaya sawit tidak hanya mengeluarkan harga bibit unggul dan pupuk yang mahal tetapi juga akses ketersediaan pupuk yang juga tidak mudah didapatkan oleh petani kecil swadaya sawit. Hal tersebut menjadi kendala bagi petani sehingga tidak dapat memenuhi praktik budidaya yang baik sesuai dengan standar seharusnya.

Dengan dana mandiri maupun dana campuran (*mix funding*) yang dimiliki saat ini, 72% petani menyatakan jika dana tersebut tidak mencukupi untuk mengelola kebun sawit termasuk kendala untuk pengadaan bibit unggul dan pupuk. Modal kerja yang terbatas dan pendapatan dari penjualan TBS yang berfluktuasi berimplikasi pada daya beli input produksi rendah sementara harga input produksi seperti bibit dan pupuk tinggi. Hal ini menjadi lebih kompleks lagi karena akses bibit dan pupuk juga sangat terbatas bagi petani kecil swadaya sawit sehingga sekalipun bagi sebagian petani (30-35%) dapat membeli input produksi namun terkendala bibit dan pupuk yang sulit diperoleh. Hasil ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yakni mayoritas petani swadaya di wilayah yang diteliti Sahara et al. (2018) menghadapi kendala modal untuk membeli input berkualitas tinggi seperti bibit bersertifikat. Kemampuan finansial petani swadaya yang rendah menyebabkan pengadaan faktor produksi tidak bisa dipenuhi sesuai dengan standar yang seharusnya (Hutabarat 2017a). Hutabarat (2017a) menyatakan bahwa akses input produksi seperti bibit unggul dan pupuk harganya cukup mahal dan sangat sulit diperoleh. Pada umumnya rantai pasok pupuk hanya diperoleh melalui saluran-saluran tertentu seperti perusahaan perkebunan, koperasi dan agen-agen yang terbatas. Inobu (2016) menemukan bahwa sumber utama dari sebagian besar petani swadaya untuk mendapatkan pupuk adalah melalui pengepul/tengkulak yang membeli TBS petani.

13. Praktek Budidaya Yang Baik (*Good Agricultural Practice*) Rendah

Tabel 8. Variabel dan Deskripsi Praktek Budidaya Yang Baik (*Good Agricultural Practice*)

No	Variabel	Deskripsi	Persentase "Ya" (%)
1	Menanam bibit kelapa sawit bersertifikat	1 = Ya ; 0 = Tidak	35
2	Melakukan pemupukan rutin	1 = Ya ; 0 = Tidak	50
3	Memanen hanya TBS yang layak panen (sudah membrodol)	1 = Ya ; 0 = Tidak	94
4	Meremajakan/replanting tanaman tua	1 = Ya ; 0 = Tidak	51
5	Paham tentang ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)	1 = Ya ; 0 = Tidak	25

Sumber: Data Primer (2019)

Terdapat 35% petani kecil swadaya sawit yang telah menanam bibit kelapa sawit bersertifikat atau bibit yang direkomendasikan. Sebanyak 50% petani kecil swadaya sawit melakukan perawatan berupa pemupukan rutin sesuai dengan usia tanaman kelapa sawit dan dosis anjuran minimal pemupukan 2x dalam setahun. Hampir semua (94%) petani kecil swadaya sawit memanen hanya TBS yang layak panen yakni yang sudah ada brondolan serta 51% mengaku meremajakan/replanting tanaman sawit yang sudah tua. Terdapat 25% petani kecil swadaya sawit yang mengaku paham dengan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Dari survei ini menunjukkan bahwa petani kecil swadaya sawit sudah mulai memiliki kesadaran/*awareness* untuk melakukan praktik budidaya yang baik dengan menanam bibit kelapa sawit bersertifikat, melakukan pemupukan rutin, memanen sesuai dengan standar perusahaan pengolahan kelapa sawit. Namun demikian daya beli input produksi yang rendah (Tabel 7) dan kendala akses tersedianya bibit dan pupuk di kalangan petani kecil swadaya sawit menjadikan persentase petani yang menanam bibit kelapa sawit bersertifikat dan melakukan pemupukan rutin masih cukup minim.

Imbas dari rendahnya praktek budidaya yang baik adalah produksi TBS petani kecil swadaya rata-rata berkisar 1,73 ton per bulan untuk luas areal rata-rata 2,35 hektar sehingga produktifitas TBS adalah 0,74 ton/Ha/bulan atau 8,8 ton/Ha/tahun (Tabel 2). Hasil ini sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata umur tanaman sawit 12,26 tahun yakni tergolong sebagai tanaman remaja dengan produksi ideal 28 ton/ha/tahun jika berasal dari bibit unggul dan menerapkan kultur teknis/GAP yang baik (Pahan 2012). Hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan bahwa petani kecil swadaya sawit pada dasarnya sudah memiliki kesadaran/*awareness* untuk melakukan praktik budidaya yang baik namun penerapan GAP secara menyeluruh oleh semua petani kecil swadaya sawit belum tercapai karena terkendala biaya/dana dan akses tersedianya bibit dan pupuk di kalangan petani kecil swadaya sawit. Oleh karena itu, rendahnya produktifitas petani kecil swadaya sawit karena GAP yang buruk menjadi suatu tantangan yang harus dibenahi tidak hanya dengan menuntut petani kecil swadaya sawit untuk memenuhi kultur teknis/GAP yang baik tetapi juga dengan memberikan perlindungan harga jual, dukungan dana/modal, akses dana dan akses input produksi guna mempermudah petani swadaya untuk mengakses input produksi yang umumnya hanya bisa diakses oleh perusahaan perkebunan swasta/BUMN dan organisasi tertentu seperti asosiasi/koperasi/kelompok petani.

14. Kurangnya Kebijakan atau Intervensi Pemerintah Yang Diterima Petani

Tabel 9. Variabel dan Deskripsi Kebijakan atau Intervensi Pemerintah Yang Diterima Petani

No	Variabel	Deskripsi	Persentase "Ya" (%)
1	Pemerintah telah menetapkan harga jual sawit (TBS) yang menguntungkan bagi petani	1 = Ya ; 0 = Tidak	37
2	Saya pernah mengikuti sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi lahan bagi petani sawit	1 = Ya ; 0 = Tidak	34
3	Pemerintah memberi kemudahan bagi para petani untuk mendapatkan sertifikat	1 = Ya ; 0 = Tidak	52

	lahan/legalitas lahan		
4	Saya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk pengelolaan kebun sawit saya	1 = Ya ; 0 = Tidak	8
5	Saya mendapatkan penyuluhan dari pemerintah tentang cara dan syarat mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan pertanian sawit	1 = Ya ; 0 = Tidak	16
6	Saya pernah mendapatkan bantuan pemerintah berupa penyediaan/ subsidi untuk bibit unggul sawit	1 = Ya ; 0 = Tidak	16
7	Saya pernah mendapatkan bantuan pemerintah berupa penyediaan/bantuan/subsidi pupuk	1 = Ya ; 0 = Tidak	26
8	Saya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk meremajakan tanaman sawit yang sudah tua	1 = Ya ; 0 = Tidak	4
9	Pemerintah (aparatur desa, kecamatan, pemerintah kabupaten dan provinsi) memberikan perlindungan (perlindungan harga, jaminan subsidi pupuk, akses ke Pabrik Kelapa Sawit) terhadap petani sawit dengan baik dalam rangka mendukung petani sawit.	1 = Ya ; 0 = Tidak	16
10	Pemerintah telah memperbaiki infrastruktur berupa jalan/jembatan di wilayah kami sehingga mempermudah akses	1 = Ya ; 0 = Tidak	62

Sumber: Data Primer (2019)

Sebanyak 37% petani kecil sawit swadaya menilai pemerintah telah menetapkan harga jual sawit yang menguntungkan bagi petani. Harga TBS pada saat survei ini dilakukan adalah Rp. 1.304,46/kg dan dinilai sebagian besar petani cukup menguntungkan (Tabel 2). Sebanyak 52% petani menilai pemerintah memberi kemudahan bagi petani untuk mendapatkan sertifikat/legalitas lahan dan 62% petani menyatakan pemerintah telah memperbaiki infrastruktur berupa jalan/jembatan sehingga memudahkan akses. Terdapat 34% mengaku pernah mengikuti sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi lahan dan 26% petani mengaku pernah mendapatkan bantuan berupa penyediaan/subsidi pupuk. Penyuluhan dari pemerintah tentang cara dan syarat mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan pertanian sawit pernah diikuti oleh 16% petani. Demikian halnya, hanya 16% petani yang pernah mendapatkan bantuan

pemerintah berupa penyediaan/subsidi bibit unggul sawit. Pemerintah dinilai telah memberikan perlindungan harga, jaminan subsidi pupuk dan akses ke pabrik kelapa sawit oleh 16% petani. Sejumlah kecil petani (4%) mengaku mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk meremajakan tanaman sawit yang sudah tua.

Hasil penelitian ini menunjukkan, intervensi pemerintah yang diterima oleh para petani kecil swadaya sawit masih rendah. Hanya 4% petani kecil swadaya sawit yang pernah mendapatkan bantuan dana *replanting*, 8% petani yang pernah mendapatkan bantuan dana untuk pengelolaan/perawatan sawit, 16% petani pernah mendapatkan bantuan bibit unggul dan 26% petani pernah mendapatkan bantuan pupuk. 16% petani pernah mengikuti sosialisasi penyuluhan tentang cara dan syarat mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan pertanian sawit dan 34% pernah mengikuti penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi lahan bagi petani sawit. 37% petani menilai pemerintah telah menetapkan harga TBS yang menguntungkan bagi petani namun demikian hanya 16% yang menilai pemerintah telah memberikan perlindungan (harga, jaminan subsidi pupuk, akses ke pabrik kelapa sawit) terhadap petani sawit dalam rangka mendukung petani sawit. Intervensi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur jalan/jembatan di wilayah petani telah dirasakan manfaatnya oleh 62% petani. Hal ini menunjukkan bahwa baik bantuan dana, bantuan input produksi ataupun sosialisasi/penyuluhan yang menjangkau hingga ke petani kecil swadaya sawit serta penetapan dan perlindungan harga TBS belum maksimal karena belum menjangkau sebagai besar petani kecil swadaya sawit. Untuk mewujudkan petani kecil swadaya sawit yang memenuhi GAP guna mengoptimalkan produktifitasnya menjadi mustahil untuk dicapai tanpa dukungan yang lebih optimal dari semua pihak terkait khususnya dari pemerintah.

Tantangan Kelembagaan: Ketersediaan Organisasi bagi Petani Kecil Swadaya Sawit Terbatas

4. Keikutsertaan Dalam Organisasi Petani Sawit

Tabel 10. Keikutsertaan Petani Dalam Organisasi Petani Sawit

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Petani berorganisasi	22,94
2	Petani tidak berorganisasi	77,06
TOTAL		100

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan hasil survei, terdapat 22,94% petani yang tergabung dalam organisasi petani dan 77,06% petani tidak bergabung. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani kecil swadaya sawit tidak bergabung dalam organisasi petani sawit. Disisi lain, bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk petani sawit disalurkan tidak secara langsung kepada petani sawit melainkan melalui kelembagaan petani seperti koperasi/asosiasi ataupun melalui perusahaan yang memiliki kontrak kerjasama dengan petani/kelompok tani. Hal ini menjadikan posisi sebagian besar (77,06%) petani kecil swadaya sawit lebih lemah karena tidak memiliki akses penting untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah. Sehingga tidak mengherankan jika hanya sebagian kecil petani kecil swadaya sawit dalam penelitian ini yang pernah menerima bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk penyuluhan, input produksi maupun dana (Tabel 9).

5. Alasan Tidak Bergabung dalam Organisasi Petani Sawit

Tabel 11. Alasan Tidak Bergabung dalam Organisasi Petani Sawit

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Belum ada organisasi petani kelapa sawit	46,44
2	Memilih untuk mandiri/tidak bergabung	30,95

3	Tidak diikutsertakan oleh organisasi setempat	4,76
4	Ketidaktahuan akan adanya organisasi petani kelapa sawit	4,76
5	Tidak memberi penjelasan	13,09
TOTAL		100

Sumber: Data Primer (2019)

Pertanyaan terbuka yang diberikan kepada para petani kecil swadaya sawit yang tidak bergabung dalam organisasi petani sawit menghasilkan lima jawaban seperti yang tercantum dalam Tabel 11 diatas. Dari hasil ini diperoleh informasi alasan sebagian besar petani (46,44%) tidak bergabung dalam organisasi petani adalah karena belum adanya organisasi petani kelapa sawit di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan ketersediaan organisasi bagi petani kecil swadaya sawit masih terbatas. Terdapat 30,95% memilih untuk tidak bergabung, 4,67% tidak bergabung karena tidak diikutsertakan oleh pengelola, 4,76% tidak bergabung karena ketidaktahuan dan sisanya sebanyak 13,09% petani tidak memberi alasan/penjelasan apapun. Sebanyak 30,95% petani kecil swadaya sawit memang memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi petani karena merasa masih mampu untuk mengelola kebunnya secara mandiri ataupun karena merasa keikutsertaan dalam organisasi pekebun tidak memberikan keuntungan dan 13,09% lainnya tidak memberikan penjelasan tentang alasan tidak bergabung.

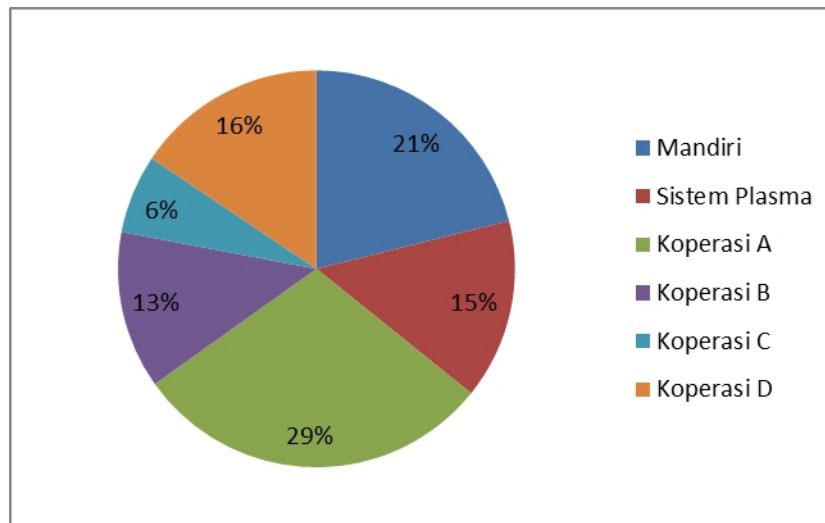
Hasil survei menunjukkan alasan terbesar tidak bergabungnya petani kecil swadaya sawit dalam organisasi petani sawit adalah karena belum adanya organisasi petani kelapa sawit di daerah mereka, tidak diikutsertakan dan tidak mengetahui adanya organisasi petani kelapa sawit. Hal ini menunjukkan jika petani kecil swadaya sawit tidak berorganisasi bukan karena enggan untuk bergabung. Dengan demikian terdapat 55,96% petani kecil swadaya sawit potensial untuk dapat bergabung dalam kelembagaan petani sawit (no 1, 3 dan 4 pada Tabel 11). Hasil ini mengindikasikan bahwa petani kecil swadaya sawit kemungkinan semakin menyadari pentingnya bagi mereka untuk berorganisasi. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik kelapa sawit yang berbeda dari komoditi pertanian lainnya seperti kebutuhan lahan yang relatif luas, biaya investasi yang besar dan kebutuhan alat pertanian serta hasil panen yang tidak dapat diolah sendiri melainkan harus diolah di Pabrik Kelapa Sawit dalam rentang waktu maksimum 24-48 jam setelah panen. Dengan karakteristik seperti ini maka dibutuhkan akses input, akses finansial, akses pasar, keterampilan manajerial, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai bagi para petani kecil swadaya yang menurut penelitian lebih memungkinkan dicapai apabila petani bergabung dalam organisasi pekebun (Sahara et al 2018).

6. Model Kelembagaan Yang Diinginkan Petani

Pada bagian ini, survei dilakukan dengan memberikan tujuh (7) pilihan model kelembagaan bagi petani kelapa sawit sebagai berikut:

- 8) Mandiri, tidak bergabung dalam kelembagaan pekebun apapun.
- 9) Sistem plasma, kemitraan petani dengan perusahaan/pabrik kelapa sawit
- 10) Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola secara mandiri oleh para petani kelapa sawit (Koperasi A)
- 11) Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh pemerintah desa setempat (Koperasi B)
- 12) Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit (Koperasi C)
- 13) Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat / LSM (Koperasi D)
- 14) Model kelembagaan lainnya yang diusulkan petani:

Dari ketujuh pilihan diatas, secara berurutan, 29% petani memilih model kelembagaan Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola secara mandiri oleh para petani kelapa sawit (Koperasi A), 21% petani memilih menjadi petani mandiri yang tidak bergabung dalam kelembagaan pekebun apapun, 16% petani memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat / LSM (Koperasi D), 15% memilih sistem plasma, 13% memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh pemerintah desa setempat (Koperasi B), 6% memilih Koperasi Petani Kelapa Sawit yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit (Koperasi C) dan tidak ada usulan untuk model kelembagaan lainnya.



Sumber: Data Primer (2019)

Gambar 3. Model Kelembagaan Pekebun Yang Diinginkan Petani

Dari perspektif petani kecil swadaya sawit, organisasi yang dikelola secara mandiri oleh petani kelapa sawit menjadi pilihan utama (29%) dibandingkan dengan koperasi petani yang dikelola oleh LSM (16%), sistem plasma (15%), organisasi petani yang dikelola oleh pemerintah desa setempat (13%) ataupun perusahaan/pabrik kelapa sawit (6%) yang paling sedikit dipilih oleh petani. Terdapat 21% petani kecil swadaya sawit memilih untuk mandiri/tidak bergabung dalam organisasi petani. Model kelembagaan yang paling banyak dipilih petani kecil swadaya sawit dalam penelitian ini adalah organisasi yang dimiliki dan dikelola oleh petani kecil swadaya sawit yang dipilih oleh 29% responden. Model ini kemungkinan yang dinilai petani kecil swadaya sawit sebagai lembaga yang paling potensial untuk menjawab tantangan petani, membawa kesejahteraan yang terbaik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan dibandingkan dengan model kelembagaan lainnya yang kurang difavoritkan. Penelitian Suharno et al. (2015) di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dikelola oleh koperasi milik petani merupakan pola yang paling menguntungkan dibandingkan pola kemitraan yang dikelola oleh perusahaan atau oleh petani individual. Sedikitnya petani yang memilih model organisasi yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit mengindikasikan rendahnya kepercayaan petani kecil swadaya sawit pada perusahaan kelapa sawit. Gunawan et al. (2018) menemukan bahwa dari tiga pola kemitraan yakni Perkebunan Inti Rakyat (PIR), pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KPPA) dan Pola Satu Manajemen (PSM) maka pola KPPA dan PSM yang dikelola penuh oleh perusahaan sawit menjadi pola kemitraan yang menimbulkan banyak permasalahan sehingga membuat petani enggan untuk bergabung.

Solusi Yang Diharapkan Petani Kecil Swadaya Sawit

Pada kuesioner survei, petani kecil swadaya sawit diberikan pertanyaan terbuka berupa solusi yang diharapkan para petani kecil swadaya sawit baik secara umum maupun secara khusus dari pemerintah (pusat/daerah) dan dari perusahaan/pabrik kelapa sawit sebagai berikut:

Perlindungan Harga Jual TBS

Solusi pertama yang diharapkan petani kecil swadaya sawit kepada pemerintah adalah jaminan harga jual TBS yang stabil. Wildayana (2016) menjelaskan bahwa masing-masing daerah memiliki kebijakan dalam menentukan harga TBS sehingga terdapat perbedaan harga, hal ini juga yang menyebabkan rentannya terjadi permainan harga pada pekebun swadaya. Dalam penelitian tersebut, Wildayana (2016) menemukan bahwa sekalipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produksi TBS petani plasma dan petani swadaya namun petani plasma mendapatkan pendapatan yang berbeda nyata karena memperoleh harga jual Rp. 1.434,00/kg TBS sementara petani swadaya mendapatkan harga jual Rp. 1.184,00/kg atau terdapat selisih Rp.250,00/kg TBS. Wildayana (2016) merekomendasikan agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga TBS untuk semua petani kelapa sawit.

Tersedianya Kelembagaan Petani Yang Memadai

Petani juga berharap pemerintah menjadikan harga pupuk dan benih lebih terjangkau dan mudah diakses oleh petani serta adanya subsidi berupa pupuk, obat-obatan kimia (*chemist*) dan benih bersertifikat bagi petani. Hal ini telah dilakukan pemerintah ataupun perusahaan dengan menyalurkan subsidi/bantuan kepada petani sawit melalui kelembagaan petani seperti asosiasi, koperasi, kelompok tani namun yang menjangkau petani kecil swadaya sawit masih sangat minim karena sebagian besar petani kecil swadaya sawit belum tergabung dalam suatu organisasi petani sawit. Menurut Pramudya et al (2015), akses pasar, akses input produksi seperti akses bibit bersertifikat dan pupuk bersubsidi mungkin hanya dapat diperoleh melalui organisasi petani. Dengan demikian, permasalahan perekonomian petani dapat diatasi melalui dukungan akses terhadap sumber daya dan modal serta meningkatkan kualitas produksi salah satunya dengan penguatan fungsi kelembagaan petani (Pramudya et al 2015). Sibarani et al. (2015) menjelaskan manfaat jika petani memiliki kelompok tani atau bergabung dalam koperasi khususnya koperasi yang sesuai dengan standar ISPO seperti petani memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi ISPO, melalui koperasi petani diarahkan untuk melakukan praktek budidaya kelapa sawit yang tepat, koperasi dapat menyediakan akses input, akses finansial, akses pasar khususnya informasi harga buah sawit secara transparan bagi petani.

Kelembagaan petani sangat krusial dalam menyediakan informasi bagi petani seperti informasi harga TBS, harga input dan teknologi yang berhubungan dengan produksi kelapa sawit yang terbaru hingga koordinasi penjualan TBS dan komunikasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan dan pemerintah (Hidayat 2017). Ketika pemerintah menetapkan untuk menyalurkan dukungan dan bantuan kepada petani melalui lembaga/organisasi petani seharusnya pemerintah juga memastikan para petani khususnya petani kecil swadaya sawit memiliki akses kelembagaan/organisasi dan mendapatkan pemberdayaan terkait penguatan kelembagaan. Temuan dalam penelitian ini adalah sebagian besar petani kecil swadaya sawit tidak berorganisasi karena ketidaktersediaan lembaga/organisasi petani di wilayah mereka. Dalam pembentukan ataupun penguatan kelembagaan petani maka diperlukan pendampingan intensif agar

para petani kecil swadaya sawit mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang manajemen organisasi mengingat banyaknya koperasi/lembaga petani di Indonesia saat ini yang tidak aktif dan ditinggalkan anggotanya.

Akses ke PKS dan perbaikan infrastruktur

Petani kecil swadaya sawit mengharapkan dukungan dari perusahaan/pabrik kelapa sawit berupa akses yang lebih terbuka kepada petani swadaya agar petani swadaya dapat menjual TBS secara langsung kepada PKS, keterbukaan/transparansi timbangan pihak pabrik kelapa sawit sebagai pembeli dan adanya kesamaan harga antara pabrik satu dengan yang lainnya. Menurut Hutabarat (2017), petani swadaya menjadi sulit mendapatkan harga tinggi karena perusahaan pada umumnya menetapkan harga yang lebih rendah untuk TBS dari kebun swadaya. Lebih lanjut menurut Sahara et al (2018) petani swadaya menerima harga TBS lebih rendah dibandingkan petani plasma karena petani plasma memiliki kontrak resmi dengan perusahaan sawit dan mengikuti harga yang ditetapkan oleh Disbun provinsi.

Petani kecil swadaya sawit berharap pemerintah memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perkebunan sawit petani kecil swadaya sawit untuk mendukung proses transportasi yang lebih memadai serta dapat menekan biaya transportasi yang tinggi karena kondisi jalanan yang sulit dilalui kendaraan bermotor. Pemerintah telah melakukan perbaikan infrastruktur namun belum optimal karena sebagian besar (61%) kondisi infrastruktur jalan/jembatan belum memadai dan terdapat perbaikan jalan masih dilakukan secara swadaya oleh para petani dengan mengeluarkan biaya sendiri yang cukup memberatkan bagi petani kecil swadaya sawit. Selain itu, kepada semua pihak yang berkepentingan, petani swadaya berharap agar lokasi PKS dapat lebih dekat dengan lokasi perkebunan petani kecil swadaya sawit untuk mengurangi biaya transportasi yang mahal. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi investor, perusahaan perkebunan dan pemerintah lokal/setempat (BUMD) untuk dapat membangun PKS di sekitar area petani sawit dan tidak tertutup kemungkinan organisasi/koperasi petani yang dikelola dengan baik dan mendapatkan dukungan dari semua pihak dapat memiliki PKS sendiri.

Penyuluhan Praktik Budidaya yang Baik

Petani kecil swadaya sawit mengharapkan dukungan dari semua pihak terkait dalam bentuk penyuluhan/pelatihan tentang budidaya sawit secara menyeluruh dari proses pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan hingga panen dan pasca panen. Dengan kondisi pendidikan petani kecil swadaya sawit yang rata-rata rendah yakni 39% lulus Sekolah Dasar (Gambar 2), dukungan berupa pelatihan dan penyuluhan mereka harapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang praktek budidaya sawit yang baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi sawit yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan yang diperoleh petani kecil swadaya sawit. Pengetahuan petani yang rendah tentang tanaman kelapa sawit menyebabkan perkebunan kelapa sawit dikelola dengan praktik-praktik budidaya yang kurang baik (Hutabarat 2017b). Namun hal ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan yang memadai bagi petani kecil swadaya sawit. Dalam penelitian ini petani kecil swadaya sawit mempertanyakan harga jual TBS yang berbeda-beda dalam wilayah dan perusahaan yang sama mengindikasikan petani belum memahami jika kondisi kebun yang berbeda (varietas bibit yang ditanam bermacam-macam dan perawatan yang seadanya) berimplikasi pada kualitas TBS yang dihasilkan akan bervariasi sehingga mempengaruhi harga jualnya. Dengan dukungan berupa

penyuluhan praktik budidaya yang baik dan meningkatkan kemampuan ekonomi petani kecil swadaya sawit maka para petani kecil swadaya sawit dapat melakukan langkah-langkah perbaikan dalam input produksinya sehingga dapat meningkatkan produktifitas hasil TBSnya. Kolaborasi pemerintah, perusahaan, LSM dan perguruan tinggi seharusnya membawa kontribusi nyata bagi kemajuan petani sawit Indonesia melalui proses pemberdayaan petani sawit.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan

Kondisi umum petani kecil swadaya sawit yang disurvei dalam penelitian ini rata-rata berumur 51,26 tahun dengan latar pendidikan lulus Sekolah Dasar 39%, lulusan SMA/SMK 28%, lulusan SMP 19%, lulusan sarjana/master 6%, lulusan diploma 4%, tidak pernah bersekolah 3%. Luas areal yang dikelola rata-rata seluas 2,35 hektar dengan status hak milik, umur tanaman sawit rata-rata 12,26 tahun dengan rata-rata produksi TBS per bulan 1,73 ton, harga jual TBS per kg rata-rata sebesar Rp. 1.304,46, pendapatan kotor dari penjualan TBS per bulan rata-rata Rp. 2.282.384,91. Sebanyak 41% petani mengusahakan komoditi lain seperti karet, kakao, kopi, kemiri, cengkeh, lada, jeruk nipis, rambutan, duku, ubi kayu, jagung nanas dan kacang tanah sebagai sumber penghasilan tambahan. Selain itu, 59% petani memiliki usaha/pekerjaan lain seperti usaha dagang, bengkel/reparsi, beternak, buruh hingga karyawan pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Dalam survei terhadap 109 petani kecil swadaya sawit yang berasal dari 14 provinsi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani kecil swadaya sawit adalah harga jual TBS berfluktuasi dan rendah sehingga penghasilan petani dari penjualan sawit menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi. Harga jual yang rendah diterima petani disebabkan oleh 3 hal yakni terbatasnya akses langsung bagi petani kecil swadaya sawit untuk menjual ke pabrik kelapa sawit, jarak lahan petani kecil swadaya sawit dari PKS yang jauh (18,91 km) dan kondisi sebagian besar (61%) infrastruktur jalan yang kurang memadai menyebabkan tingginya biaya transportasi yang dibebankan ke petani kecil swadaya sawit.

Mayoritas (94%) petani kecil swadaya sawit menggunakan dana mandiri yang tidak mencukupi untuk operasional budidaya sawit. Hanya sebagian kecil (20-25%) yang mendapatkan akses pinjaman informal dan hanya 17% yang dapat mengakses pinjaman ke lembaga keuangan formal. Hal ini menunjukkan minimnya pendanaan bagi petani kecil swadaya sawit. Biaya input produksi seperti harga pupuk dan bibit unggul tidak terjangkau oleh sebagian besar (65-70%) petani kecil swadaya sawit begitu juga dengan akses ketersediaan bibit dan pupuk yang tidak mudah didapatkan oleh para petani kecil swadaya sawit. Petani kecil swadaya sawit sudah mulai memiliki kesadaran/*awareness* untuk melakukan praktik budidaya yang baik dengan menanam bibit kelapa sawit bersertifikat (35%), melakukan pemupukan rutin (50%), memanen sesuai dengan standar perusahaan pengolahan kelapa sawit (95%), meremajakan tanaman sawit yang sudah tua/replanting (51%), paham tentang *Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO* (25%). Namun dengan modal kerja terbatas, input produksi mahal dan akses input produksi sulit bagi petani untuk dapat menerapkan praktik budidaya yang memadai. Produktivitas petani kecil swadaya sawit sangat rendah yakni berkisar pada 8,8 ton/ha/tahun untuk tanaman usia 12,26 yang produktifitas idealnya bisa mencapai 28 ton/ha/tahun.

Intervensi pemerintah masih kurang menjangkau petani kecil swadaya sawit khususnya untuk bantuan dana *replanting*, bantuan dana perawatan kebun, bantuan input produksi dan penyuluhan karena bantuan disalurkan ke petani melalui organisasi/lembaga sehingga hanya menjangkau petani yang telah berorganisasi

padahal sebagian besar petani kecil swadaya sawit (77,06%) belum bergabung dalam organisasi petani karena belum tersedianya organisasi petani di wilayah mereka. Di sisi lain, terdapat 21% petani kecil swadaya sawit yang ingin tetap menjadi petani mandiri tanpa bergabung dalam organisasi apapun. Upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur jalan telah diterima manfaatnya oleh 62% petani namun demikian kondisi infrastruktur jalan di wilayah 61% petani kecil swadaya sawit belum memadai. Legalitas lahan ditemukan bukan menjadi tantangan berarti bagi petani karena sebagian besar (84%) telah memiliki sertifikat tanah.

Sebagian besar (77,06%) petani kecil swadaya sawit tidak bergabung dalam lembaga/organisasi petani karena tidak tersedianya lembaga/organisasi petani di wilayah mereka (46,44%), 30,95% memilih untuk tidak bergabung, 4,67% tidak bergabung karena tidak diikutsertakan oleh pengelola, 4,76% tidak bergabung karena ketidaktahuan dan sebanyak 13,09% petani tidak memberi alasan/penjelasan apapun. Hal ini menunjukkan ketersediaan organisasi bagi petani kecil swadaya sawit masih terbatas. Model kelembagaan yang paling banyak dipilih petani kecil swadaya sawit adalah koperasi petani yang dikelola oleh petani sendiri (29%). Model kelembagaan petani yang dikelola oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit merupakan model kelembagaan yang paling sedikit dipilih (6%).

Solusi yang diharapkan petani kecil swadaya sawit untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi adalah perlindungan harga TBS oleh pemerintah, tersedianya kelembagaan petani yang memadai, terdapat akses bagi petani kecil swadaya sawit ke pabrik kelapa sawit, perbaikan infrastruktur dan penyuluhan tentang praktek budidaya yang benar/GAP yang terstruktur dan menyeluruh dari pembibitan hingga panen kepada petani kecil swadaya sawit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan untuk dapat mengatasi tantangan ekonomi dan kelembagaan petani kecil swadaya sawit di Indonesia adalah sebagai berikut:

Defenisi perkebunan rakyat dan petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 25 hektar perlu untuk dikaji lebih lanjut. Diperlukan pendataan dan pemetaan resmi dari pemerintah untuk 40,62% lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perkebunan rakyat (petani). Dengan data resmi maka dapat diketahui karakteristik dan penggolongan petani (kecil, sedang, besar) guna pengambilan kebijakan yang tepat sasaran demi perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya untuk kalangan petani swadaya.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan harga jual TBS bagi para petani kecil swadaya sawit dengan menetapkan kebijakan harga TBS untuk semua petani kelapa sawit secara transparan agar tidak terjadi kesenjangan harga yang besar khususnya di kalangan petani kecil swadaya sawit yang tidak memiliki kontrak dan akses langsung ke PKS. Dengan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan dukungan/bantuan kepada petani sawit melalui lembaga petani/perusahaan maka seharusnya kelembagaan di masyarakat petani sawit juga telah dipersiapkan. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas petani kecil swadaya sawit tidak bergabung karena tidak tersedianya organisasi petani di wilayah mereka.

Penyediaan dan pemberdayaan kelembagaan petani perlu dilakukan secara intensif dan menyeluruh sehingga dapat menciptakan organisasi petani yang dikelola dengan baik dan membawa manfaat/keuntungan bagi petani kecil swadaya sawit. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat diterima secara menyeluruh oleh para petani sawit dan tidak terbatas pada petani yang telah bergabung dalam koperasi dan petani plasma. Di sisi lain, para petani kecil swadaya sawit perlu diwajibkan untuk bergabung dalam organisasi petani guna mendapatkan akses yang lebih baik terhadap input produksi, keuangan, pasar, penyuluhan dan intervensi pemerintah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan hanya 11% petani dalam penelitian ini yang memiliki akses untuk menjual langsung TBSnya ke PKS. Perusahaan perkebunan sawit/PKS perlu untuk mengakomodasi kebutuhan petani kecil swadaya sawit di wilayahnya dengan membangun kemitraan yang setara, adil, transparan dan saling menguntungkan. Demi optimalnya intervensi untuk meningkatkan peran petani kecil swadaya sawit maka diperlukan kolaborasi dari semua pihak termasuk meningkatkan peran LSM dan perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi dalam proses pemberdayaan petani kecil swadaya sawit melalui pelatihan, penyuluhan dan pendanaan bagi petani kecil swadaya sawit. Dengan latar belakang pendidikan mayoritas sekolah dasar, para petani kecil swadaya sawit memerlukan pelatihan baik untuk teknis budidaya maupun kelembagaan petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karuniaNya sehingga naskah ini berhasil dipublikasikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik LPP Yogyakarta atas hibah penelitian tahun 2019 yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dan orang tua masing-masing yang merupakan petani kelapa sawit swadaya dan telah berkontribusi sebagai responden dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Ibu Ari Christanti dan Zazilatul Rochma atas masukan dan bantuannya dalam proses penelitian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Agustira MA, Amalia R, Nurkhoiry R. 2015. Program Sawit Untuk Rakyat (PROWITRA) sebagai upaya peningkatan produktivitas, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun kelapa sawit rakyat. Prosiding Seminar Nasional "Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian dalam Rangka Pencapaian Kemandirian Pangan Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Petani": 315-24. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian.

- [Daemeter] Daemeter Consulting. 2015. Indonesia oil palm smallholder farmers: a typology of organizational models, needs, and investment opportunities. Bogor (ID): Daemeter Consulting
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit 2018 – 2020 Jakarta (ID): Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
- Effendi S. 2012. Metode penelitian survei (edisi revisi 2012). Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Gunawan, Talman P, Tirayoh J, Andri M, Syamsitro Z. 2018. Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan Sawit. Bogor (ID): Serikat Petani Kelapa Sawit.
- Hidayat NK. 2017. Tinjauan Buku: menghidupkan sektor sawit melalui petani, lesson-learned Hivos untuk isu sawit berkelanjutan. Masyarakat Indonesia 43(1): 143-149
- Hidayat NK, Offermans A, Glasbergen P. 2016. On the profitability of sustainability certification: An analysis among Indonesian Palm Oil Smallholders. Journal of Economics and Sustainable Development 7(12): 45-62.
- Hutabarat S. 2017a. Tantangan keberlanjutan pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam perubahan perdagangan global. Masyarakat Indonesia 43(1): 47-64.
- Hutabarat S. 2017b. ISPO certification and Indonesian oil palm competitiveness in global market smallholder challenges toward ISPO certification. Agro Ekonomi 28(2): 170-188
- Idsert J dan Schoneveld GC. 2016. Mewujudkan petani kecil sawit mandiri yang lebih produktif dan berkelanjutan di Indonesia. Working Paper 217. Bogor (ID): CIFOR
- [INOBU] Institut Penelitian Inovasi Bumi. 2016. Seluk beluk pekebun kelapa sawit dan tantangan budidaya sawit secara swadaya: studi kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia. Jakarta (ID): Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU).
- Kubitza C, Krishna VV, Alamsyah Z, Qaim M. 2018. The economics behind an ecological crisis: livelihood effects of oil palm expansion in Sumatra, Indonesia. Human Ecology (2018) 46:107-116

- Naylor RL, Higgins MM, Edwards RB, Falcon WP. 2019. Decentralization and the environment: assessing smallholder oil palm development in Indonesia. Royal Swedish Academy of Sciences 2019.
- Pahan I. 2012. Manajemen Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Jakarta (ID): Penebar Swadaya
- Pohan M. 2015. Dampak penurunan harga sawit terhadap kesejahteraan petani sawit di pantai timur Sumatera Utara. Jurnal Ekonomikawan 15(2): 113-129
- Pramudya EP, Prawoto A, Hanifa R. 2015. Menghijaukan sektor sawit melalui petani, lesson-learned Hivos untuk isu sawit berkelanjutan. Jakarta (ID): ReneBook.
- Sahara S, Haryadi H, Kusumowardhani N. 2018. Pembiayaan bagi petani kecil di sektor kelapa sawit: analisis kesenjangan antara skema kredit yang tersedia dan pembiayaan yang dihadapi petani kecil. Infobrief No. 214. Bogor, Indonesia: CIFOR
- Saputra IMGD, Anggreni IGAAL, Dharma IP. 2017. Pola kemitraan usaha tani kelapa sawit kelompok tani telaga biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. E-jurnal Agribisnis dan Agrowisata 6 (2) : 249-258
- Sibarani DYT, Hutabarat S, Dewi N. 2015. Prospek dan tantangan petani kelapa sawit swadaya di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam menghadapi sertifikasi ISPO. Jom Faperta 2(1): 1-15.
- Suharno, Yuprin, AD., Barbara, B. 2015. Analisis kinerja usahatani perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pola kemitraan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Agribisnis Indonesia 3 (2) : 135 – 144
- Sukardi. 2017. Metodologi penelitian pendidikan: kompetensi dan praktiknya. Jakarta (ID): Penerbit Bumi Aksara
- Wildayana E. 2016. Pendekatan pengendalian fluktuasi harga tandan buah segar terhadap pendapatan petani kelapa sawit. Jurnal Habitat 27(3): 103-108